

SINERGI

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 28/April 2018



Ikuti
Kuis BPIW
di hal.65

BPIW Siap Susun Rencana Induk Pariwisata yang Terintegrasi



BPIW • Kementerian PUPR

2018, Kementerian PUPR Susun MPDP Tiga Kawasan



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804



Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, buletin Sinergi sudah memasuki edisi April 2018. Pada edisi ini akan mengangkat Kabar Utama terkait pelaksanaan *integrated tourism masterplan* (ITMP) di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika atau Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Untuk rubrik Wawancara menampilkan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bobby Prabowo. Dalam rubrik tersebut, ia menyampaikan beberapa program prioritas Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR.

Kemudian Laporan Khusus membahas rencana pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara. Selain itu, sejumlah berita kegiatan selama bulan April ditampilkan dalam rubrik Kilas BPIW.

Selain itu hadir rubrik Potret yang berisi dokumentasi dari kegiatan partisipasi Pameran BPIW di Kampus ITB serta kegiatan pelatihan fotografi dan pemberitaan di Yogyakarta. Rubrik ringan tetap mewarnai Buletin Sinergi edisi ini seperti Serba-serbi yang membahas mengenai Lima Kota Jaringan Kreatif Unesco dan rubrik Tips yang mengupas bekerja optimal saat berpuasa.

Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-jalan yang membahas keindahan Kota Pare-pare dan ulasan berita yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW

Tim Penyusun:

Pelindung:
Lana Winayanti

Pengarah:
Firman Hatorangan Napitupulu

Penasehat
Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Sucahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:
P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:
Shovichah

Editor :
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Alis Listalatu
Rian Farhan
Fitri Selva

Sekretariat:
Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design : Heri Hito
Infografis & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



04 Kabar Utama:
BPIW Siap Susun Rencana Induk
Pariwisata yang Terintegrasi



56 Serba Serbi
5 Kota yang Masuk *Creative Cities*
Network UNESCO

Edisi 28 / April 2018

daftar isi



12

Wawancara:

Ir. Bobby Prabowo, CES
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR,
BPIW Kementerian PUPR

42

Lapsus:

2018, Kementerian PUPR Susun MPDP
Tiga Kawasan



60

Teknologi:

Kementerian PUPR Kembangkan Teknologi
IPA dan IPAL di Kawasan Wisata Danau Toba

62

Potret:

Workshop Peningkatan Pemberitaan
BPIW

BPIW Siap Susun Rencana Induk Pariwisata yang Terintegrasi

Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika/Lombok. Sebagai bagian dari upaya pengembangan tiga KSPN yang mendapat pinjaman dari Bank Dunia tersebut, akan disusun Integrated Tourism Masterplan. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR siap mengemban kepercayaan dari pemerintah yakni menyusun rencana induk pariwisata yang terintegrasi tersebut.



Borobudur



Diskusi teknis di Bank Dunia Jakarta terkait pinjaman proyek pengembangan pariwisata.

Sumber: BPIW

Salah satu yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini adalah pengembangan pariwisata. Ditargetkan 20 juta wisatawan mancanegara dapat berkunjung ke Indonesia pada 2019 mendatang. Untuk itu pemerintah memprioritaskan 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kesepuluh KSPN tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika/Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Kemudian ditambah dua KSPN yakni Toraja (Sulawesi Tenggara) dan Mandeh (Sumatera Barat).

Kini dari 10+2 KSPN itu, pemerintah lebih fokus pada penanganan tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika/Lombok. Untuk tiga KSPN tersebut. Pemerintah memandang perlu mengintegrasikan *masterplan* terkait pariwisata atau disebut *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP).

Sebagaimana diketahui bahwa ITMP merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta

rencana program *Infrastructure for Tourism*. Proses lelang hingga pelaksanaan dari ITMP ini mendapatkan *loan* atau pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia.

Saat diskusi teknis terkait pinjaman untuk proyek pengembangan pariwisata di Indonesia atau *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) di kantor Bank Dunia, (19/4) lalu, Bank Dunia menyetujui untuk memberikan bantuan dukungan dana sebesar 300 juta dolar Amerika untuk kegiatan fisik dan non fisik di Kawasan Strategis Pariwisata tersebut.

Pada kesempatan itu juga Bank Dunia dan pemerintah Indonesia menyepakati substansi *Loan Agreement* atau Perjanjian Pinjaman pengembangan tiga KSPN tersebut. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Teknis antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Dari pihak Bank Dunia yang menandatangani kesepakatan itu adalah *Task Team Leader*, Bertine Kamphuis. Sedangkan dari pihak Indonesia diwakili Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan, Suminto.

Setelah penandatanganan ini perwakilan Bank Dunia Indonesia akan melaporkan hasil pertemuan ke Dewan Pimpinan Eksekutif di kantor pusatnya di Washington DC Amerika

ITMP merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta rencana program *Infrastructure for Tourism*. Proses lelang hingga pelaksanaan dari ITMP ini mendapatkan *loan* atau pinjaman dari Bank Dunia.



Pantai kuta Lombok Mandalika

Sumber: BPIW

Menyusun ITMP merupakan kepercayaan dari pemerintah kepada BPIW yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menyusun ITMP tersebut kata Hadi, BPIW selalu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Pariwisata maupun Bappenas.

Serikat. Selanjutnya akan dilakukan secara *official* penandatanganan *Loan Agreement* oleh menteri-menteri terkait termasuk Menteri PUPR dengan Bank Dunia.

Diskusi teknis itu dihadiri perwakilan Bank Dunia asal Indonesia yakni Evi Hermirasari (*Team Member*) dan Yogana Prasta (*Operations and Portfolio*). Dari pihak Indonesia ada perwakilan Bappenas Grasia Veranita, perwakilan Kementerian Pariwisata Indra Ni Tua (Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata), perwakilan BKPM, dan perwakilan Kementerian PUPR.

Anggota delegasi pemerintah Indonesia yang juga Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan dari 300 juta dolar itu, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana kurang lebih 261 juta dollar. Sisanya untuk BKPM dan Kementerian Pariwisata.

Bantuan Bank Dunia ini akan digunakan untuk kegiatan *software* seperti penyusunan *masterplan*, dan kegiatan fisik untuk membangun jaringan jalan dan infrastruktur dasar, serta pengembangan investasi dan penyiapan SDM pariwisata.

Dijelaskannya bahwa sejak tahun lalu

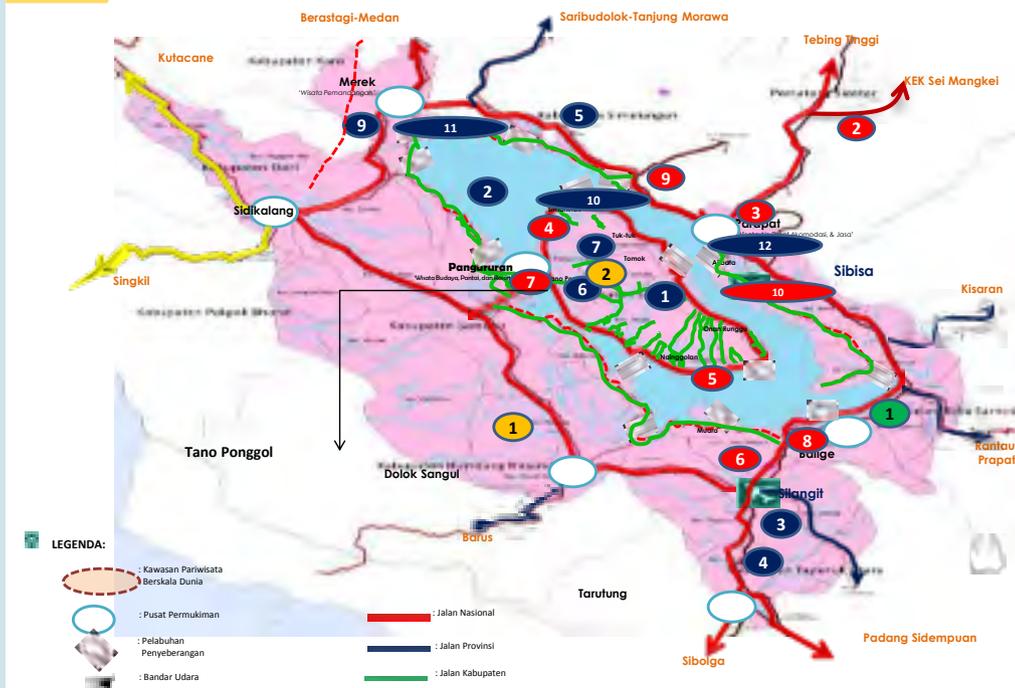
Kementerian PUPR diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengawal ITDP bersama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan BPIW memiliki tanggung jawab menyusun ITMP. BPIW sudah mengawal proses penyusunan ITMP itu mulai dari proses lelang internasional yang diikuti puluhan konsultan dalam dan luar negeri.

“Jadi untuk pertama kalinya Kementerian PUPR menjadi koordinator ITMP untuk mendukung kegiatan fisik dan non fisik untuk pengembangan pariwisata terpadu. Kemudian juga untuk pertama kalinya pemerintah membuat ITMP dengan melibatkan berbagai kementerian terkait,” ungkap Hadi.

Menurut Hadi menyusun ITMP merupakan kepercayaan dari pemerintah kepada BPIW yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menyusun ITMP tersebut kata Hadi, BPIW selalu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Pariwisata maupun Bappenas.

Dikatakannya bahwa kunci dalam mengoptimalkan pengembangan sebuah destinasi wisata adalah 3A, yakni Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Dijabarkannya

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Danau Toba



bahwa untuk “A” yang pertama, yakni “Atraksi” berarti kawasan wisata tersebut memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik, misalnya tarian maupun prosesi adat istiadat.

Kemudian “A” yang kedua adalah “Aksesibilitas” atau sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata. Sedangkan “A” yang ketiga adalah “Amenitas” atau fasilitas lain seperti toko kerajinan tangan khas daerah.

“Jadi yang direkomendasi dalam ITMP nanti adalah di mana dan apa kebutuhan daerah untuk mempromosikan pariwisata diluar infrastruktur. Misalnya pusat kerajinan Danau Toba dan tempat aktraksinya berada di mana. Itu harus jelas,” tegas Hadi.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain menyusun *Environmental and Social Management Frameworks* (ESMF) atau Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan *Readiness Criteria* (RC) atau kriteria kesiapan.

ESMF sebagai komponen *Investment Project Financing* (IPF) atau pembiayaan proyek investasi disusun untuk menapis atau menyaring, mengidentifikasi, menghindari, mengurangi, dan menghilangkan risiko potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari investasi yang

direkomendasikan di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT). Termasuk juga yang direkomendasikan rencana detail pembangunan atau dibahas di dalam studi kelayakan atau desain pekerjaan yang dibiayai berdasarkan IPF tersebut.

Sedangkan draft *Readiness Criteria* telah disusun oleh Tim BPIW, dimana di dalamnya telah diidentifikasi tim *Steering Committee* dengan Kementerian PUPR sebagai *Project Coordination Office* (PCO).

Berikut uraian lokasi yang akan disusun ITMP:

1. Mandalika/ Lombok

Pulau Lombok mencakup empat destinasi wisata utama, yakni Kepulauan Gili, Pantai Senggigi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dan Taman Nasional Rinjani. Pulau Lombok memiliki populasi penduduk sekitar 3,3 juta penduduk dengan luas pulau 4.379 km².

Daya tarik wisata di Pulau Lombok, khususnya di Kepulauan Gili dan Senggigi adalah wisata bahari, seperti pantai dan tujuan untuk menyelam. Saat ini sedang dilakukan pembangunan hotel skala besar oleh ITDC (Indonesia *Tourism Development Corporation*) di Mandalika. Wisata di daerah tersebut disebut juga wisata maritim, karena sangat

“Jadi yang direkomendasi dalam ITMP nanti adalah di mana dan apa kebutuhan daerah untuk mempromosikan pariwisata diluar infrastruktur. Misalnya pusat kerajinan Danau Toba dan tempat aktraksinya berada di mana. Itu harus jelas,” tegas Hadi.



Danau Toba

Sumber: Shutterstock

Draft *Readiness Criteria* telah disusun oleh Tim BPIW, dimana di dalamnya telah diidentifikasi tim *Steering Committee* dengan Kementerian PUPR sebagai *Project Coordination Office* (PCO).

mengandalkan keindahan pantai dan lautan.

Dukungan infrastruktur PUPR di kawasan Mandalika, seperti beberapa program infrastruktur yang akan dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga seperti Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram dan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (187,5 km) (2 jalur/2 lajur).

Ditjen Cipta Karya akan melakukan peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Gapuk dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Narmada (Sistem *Remening*). Sedangkan Ditjen Sumber Daya Air akan membangun Sistem Jaringan Air Baku Remening di Kabupaten Lombok Barat dan Pembangunan Drainase Primer Kota Gerung. Penyediaan permukiman juga menjadi perhatian Kementerian PUPR. Beberapa program dari Ditjen Perumahan yang dilakukan seperti Penyediaan Rumah Susun Kab. Lombok Utara dan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya, Kab. Lombok Tengah.

2. Danau Toba

Danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki tiga kawasan prioritas, yaitu pertama, Parapat yang berada di Kecamatan

- Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Daerah tersebut sebagai pintu utama menuju Pulau Samosir, sekaligus fokus pengembangan infrastruktur wisata.

- Kawasan wisata yang kedua adalah Pulau Samosir, khususnya desa wisata yang ada di Kecamatan Simanindo dan Pangururan. Di desa wisata ini ada atraksi seperti Kursi Batu Raja Siallagan dan Makam Raja Sidabutar. Selain itu terdapat Desa Ambarita yang memiliki budaya adat Batak yang kental, Pantai Parbaba, Pemandian Air Panas di Gubung Gunung Pusuk Buhit, dan desa wisata Tuktuk. Di desa wisata ini Kementerian PUPR telah memberi dukungan seperti penataan pedestrian dan juga perbaikan jalan lingkar Samosir.

- Daerah wisata yang ketiga adalah Kecamatan Balige, di mana terdapat Bandara Silangit yang merupakan bandara terdekat menuju ke Danau Toba. Bandara Sibisa juga akan dibangun, di mana Kementerian PUPR juga membangun jalan akses ke bandara tersebut. Kawasan Danau Toba ini disebut juga *Supervolcano Geopark*.

- Dalam mendukung pengembangan KSPN Danau Toba tersebut, terdapat beberapa program infrastruktur PUPR yang telah



dibuat perencanaannya oleh BPIW dan sudah direalisasikan. Beberapa diantaranya adalah Jalan akses Bandara Sibisa dengan trase Jalan Nasional (Simpang Gibion) menuju Bandara sepanjang 7 kilometer.

Pada tahun 2017, Ditjen Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara melaksanakan pengerjaan jalan akses (*frontage*) sepanjang 2,5 km pada sisi kanan dan kiri ruas jalan, dengan lebar masing-masing 4,8 m. Sisa panjang jalan akses yang sepanjang 4,5 km direncanakan untuk dibangun pada tahun 2018 ini.

Kemudian didalam *Development Plan* Danau Toba Tahun 2015-2019 sudah direalisasikan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Ajibata pada tahun 2017.

Hasil pelaksanaan Rakernas 2017 lalu, telah ditetapkan 10 *pilot project* Desa Wisata Nasional oleh Kementerian PUPR. Salah satunya adalah Desa Wisata Ambarita yang berlokasi di Kabupaten Pulau Samosir, Kecamatan Simanindo. Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur sanitasi berupa toilet umum yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya.

Selain juga dilakukan pembangunan Jembatan Tano Ponggol. Pembangunan jembatan dilaksanakan Ditjen Bina Marga. Jembatan itu merupakan proyek *multiyears* atau dibangun secara bertahap, sejak tahun 2016 dengan total panjang 100 m. Tahun 2017 lalu Kementerian PUPR mulai melaksanakan normalisasi dan pelebaran terusan Tano Ponggol dari semula 12 m menjadi 100 m. Tano Ponggol adalah terusan yang

memisahkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera. Terusan tersebut saat ini memiliki lebar 8-12 m.

Dengan pelebaran terusan tersebut diharapkan nantinya dapat dilalui oleh kapal pesiar kecil. Wisatawan dapat mengelilingi pulau Samosir dapat menggunakan kapal pesiar, sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir. Pelebaran terusan menjadi 100 meter tersebut dilaksanakan sepanjang 1,2 km yang akan diselesaikan pada tahun 2018.

Pembangunan Jalan Lingkar Samosir dilaksanakan secara *multiyears* yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sepanjang 145,9 km, yang dibagi dalam dua paket pelaksanaan, yaitu Paket 1 (lingkar utara) yakni Ruas Pangururan – Simanindo – Ambarita – Tomok – Onan Runggu dengan total panjang 76,9 km. Paket 2 (lingkar selatan) : Ruas Tele – Pangururan – Nainggolan – Onan Runggu dengan total panjang 69 km.

Dalam mendukung pengembangan KSPN Danau Toba tersebut, terdapat beberapa program infrastruktur PUPR yang telah dibuat perencanaannya oleh BPIW dan sudah direalisasikan. Beberapa diantaranya adalah Jalan akses Bandara Sibisa



Perwakilan Bank Dunia dan pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan substansi Loan yakni Agreement pengembangan tiga KSPN.

Sumber: BPIW

3. Borobudur

Kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya, direncanakan dengan visi *"The Capital Buddhist Heritage in The World"* memiliki tiga atraksi utama, pertama Kawasan Borobudur, termasuk Candi Borobudur sebagai UNESCO *World Heritage Site*, Candi Pawon dan Candi Mendut, serta desa-desa adat di sekitarnya. Kedua, Candi Prambanan dan Ratu Boko (UNESCO *World Heritage Site*), Candi Sewu, Candi Buhrah dan Candi Lumbung. Ketiga, Yogyakarta dengan atraksi utama Kraton Kesultanan Yogyakarta sekaligus museum, Taman Sari, dan Kawasan Wisata Belanja Malioboro.

Kementerian PUPR juga akan memacu pengembangan KSPN Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik.

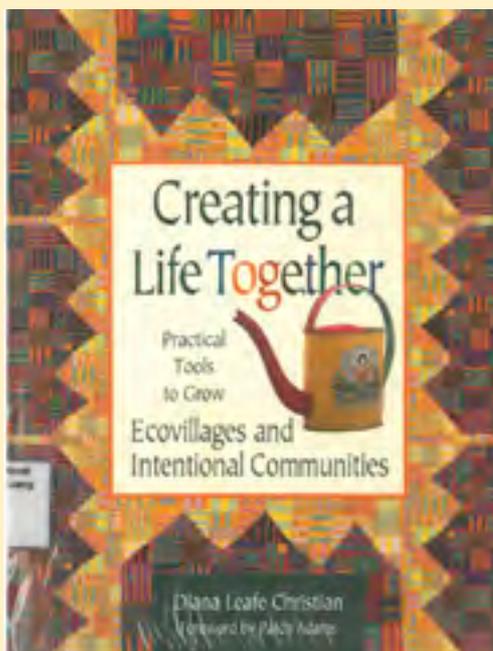
Pembangunan sistem konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, antara lain pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Direncanakan konstruksi proyek akan dilakukan pada pertengahan 2018 ini.

Jalan nasional yang ada di dalam kawasan Borobudur juga akan mendapat penangan untuk dilakukan peningkatan termasuk jalan pantai selatan Jawa yang melewati 3 Kabupaten yakni Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul.

Program infrastruktur yang dibuat dan direalisasikan Kementerian PUPR tersebut akan disinergikan dengan kementerian/ lembaga lain didalam ITMP. Sehingga ITMP akan menjadi dokumen perencanaan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung keterpaduan pengembangan pariwisata secara optimal.

Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai *guidance* bagi sektor-sektor terkait pariwisata agar mampu memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ITMP juga akan berperan sebagai peta program kebutuhan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata pada beberapa titik prioritas. (Heru/Tim Redaksi)

Kementerian PUPR juga akan memacu pengembangan KSPN Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik.

**Judul Buku :**

Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities

Pengarang :

Diana Leafe Christian

Penerbit : New Society Publishers

Tahun Terbit : 2003

Jumlah Halaman : 250 halaman

Creating a Life Together: Menciptakan Komunitas yang Berkelanjutan

Buku ini membahas mengenai Komunitas Buatan (*Intentional Community*). Komunitas yang sengaja diciptakan ini terdiri atas sekelompok orang yang telah memilih untuk hidup atau bekerja sama dalam mengejar cita-cita atau visi bersama. Sebuah *ecovillage* adalah komunitas yang berskala desa yang bertujuan untuk menciptakan ekologi, sosial, ekonomi, dan spiritual berkelanjutan selama beberapa generasi.

Pada tahun 90-an terlihat adanya gerakan di komunitas dan desa-desa di Amerika Utara: jumlah komunitas buatan yang terdaftar dalam Direktori Komunitas meningkat 60 persen antara tahun 1990 dan 1995. Tetapi hanya 10 persen dari jumlah sebenarnya dari kelompok-kelompok pembentuk-masyarakat yang benar-benar berhasil, sedangkan 90 persennya gagal, seringkali karena konflik dan kekecewaan. Setelah mengunjungi dan mewawancarai para pendiri puluhan komunitas yang sukses dan gagal, bersama dengan pengalaman membentuk-komunitasnya sendiri, penulis buku ini menyimpulkan bahwa "10 persen yang sukses" semuanya telah melakukan lima atau enam hal yang benar, dan "90 persen yang tidak berhasil" telah membuat kesalahan yang sama. Menyadari bahwa kekayaan kebijaksanaan terkandung dalam pengalaman-pengalaman ini, penulis berangkat untuk menyuling dan menangkapnya di satu tempat.

Buku ini membahas bagaimana menciptakan hidup bersama dalam sebuah komunitas. Di dalamnya juga dipaparkan bagaimana langkah demi langkah tentang cara memulai dan mempertahankan komunitas *ecovillage* dan komunitas yang berhasil. Buku ini dibagi menjadi 3 bab besar. Bab pertama diberi judul "*Menanam Benih Komunitas yang Sehat*". Di dalamnya terdapat beberapa bagian pembahasan antara lain: 10 Persen Sukses dan 90 Persen Gagal; Peran Pendiri Komunitas; Memulai Dengan Permulaan yang Baik; Perlunya Visi Komunitas; Menciptakan Dokumen Visi; Kekuasaan, Pengambilan Keputusan, dan Pemerintahan.

Bab kedua diberi judul: "*Teknik dan Alat Menumbuhkan Komunitas Baru*". Di dalamnya dibahas antara lain mengenai: Kesepakatan & Kebijakan; Perlunya Jalur Hukum Sebelum Membeli Properti; Menemukan, Membiayai, dan Mengembangkan Lahan; Penataan Zona dan Pertetangga; Membiayai Properti; Membangun Permukiman yang Berkelanjutan; serta Keuangan Internal Komunitas.

Bab ketiga berjudul "*Mengembangkan dan Memupuk Komunitas*". Di dalamnya antara lain dibahas mengenai: Proses Komunikasi dan Cara Menghadapi Konflik; dan Pemilihan Anggota Baru untuk Bergabung.

Diana Leafe Christian, penulis buku ini, adalah editor majalah *Communities* dan telah berkontribusi antara lain untuk *Body & Soul*, *Yoga Journal*, dan *Shaman's Drum*. Dia adalah pembicara publik yang populer dan pemimpin lokakarya tentang pembentukan komunitas buatan. Dia juga adalah anggota komunitas yang disengaja di North Carolina. **(Mutri)**

Buku ini membahas bagaimana menciptakan hidup bersama dalam sebuah komunitas. Di dalamnya juga dipaparkan bagaimana langkah demi langkah tentang cara memulai dan mempertahankan komunitas *ecovillage* dan komunitas yang berhasil.



Sumber: Dok.BPIW

BPIW Harus Menjadi *Solution Maker*

Ir. Bobby Prabowo, CES

.....
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menjadi *solution maker* dalam membuat perencanaan infrastruktur yang berlandaskan keterpaduan antar sektor PUPR. Seperti itulah pemikiran Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

BPIW Kementerian PUPR Ir. Bobby Prabowo, CES, saat dibincangi Buletin Sinergi di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Ia juga menegaskan bahwa Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur yang sedang dibuat pusatnya sangat penting, karena perencanaan harus ada arah dan tujuan. Berikut wawancara lengkapnya.

Apa yang menjadi fokus kegiatan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR sepanjang tahun 2018 ini?

Ada beberapa kegiatan yang menjadi fokus pusat kita, seperti *Review Rencana Strategis (Renstra)*. *Review Renstra* ini sudah ditandatangani Pak Menteri. Kemudian fokus kita yang lain yakni pembuatan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (Ripi) sektor PUPR.

Rancangan peraturan menteri-nya sedang dibuat. Itu yang paling penting. Tahun ini kita juga menyiapkan Renstra Teknokratik yang merupakan persiapan untuk menyusun Renstra PUPR 2020-2024. Diharapkan pada awal pemerintahan yang baru hasil Pemilihan Presiden 2019 nanti, Renstra sudah siap.

Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR juga telah membuat Sibas Ripi. Bisa dijelaskan, apa itu Sibas Ripi dan mengapa dibuat Sibas Ripi itu?

Sibas Ripi merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Data *Base Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur. Sibas Ripi merupakan aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah. Hal ini diperlukan, karena perencanaan harus ada arah dan tujuan.

Arah dan tujuan ini berupa rencana induk. Dengan adanya rencana induk, maka

perencanaan akan terarah pada apa yang akan kita capai. Seperti kita membangun selama lima tahun, kalau tidak ada Renstra kita tidak ada panduan. Oleh karena itulah kita harus membuat itu.

Siapa yang bisa menggunakan Sibas Ripi ini?

Semua unit organisasi atau unor terutama di lingkungan Kementerian PUPR. Sibas Ripi ini merupakan sistem data *base* rancangan infrastruktur. Jadi harusnya terbuka dan bisa kita koreksi.

Apa yg menjadi tantangan dalam membuat perencanaan di masa sekarang ini?

Tantangan pertama adalah masalah data. Sebab dalam membuat perencanaan kita perlu data pendukung seperti kondisi suatu daerah. Data bersifat mendukung dalam membuat perencanaan.

Tantangan kedua adalah mengintegrasikan perencanaan yang dibuat unor di lingkungan Kementerian PUPR seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Perencanaan yang kita buat harus menjadi acuan bagi unor-unor, dan perencanaan yang kita buat berbasis pada pengembangan wilayah.

“Sibas Ripi merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Data *Base Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur. Sibas Ripi merupakan aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah. Hal ini diperlukan, karena perencanaan harus ada arah dan tujuan. Arah dan tujuan ini berupa rencana induk”

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2007)





Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Bidang Perencanaan Infrastruktur II telah mengembangkan Sistem Informasi dan Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR (SIBAS RIPI PUPR) sejak tahun 2016.

SIBAS RIPI PUPR

Merupakan media koordinasi dengan unit organisasi yang melaksanakan perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah, untuk membantu pelaksanaan keterpaduan perencanaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah.

Terobosan apa yang harus kita lakukan agar perencanaan yang dilakukan bisa dilaksanakan unor-unor?

Perencanaan yang kita buat harus kita sampaikan ke unor-unor, sehingga dapat kita padukan perencanaan yang kita buat dengan yang mereka buat. Kita perlu mendatangi setiap unor, satu per satu. Jadi semacam *tour* ke unor-unor. Tidak perlu *full* tim, cukup kepala pusat dan sekretaris badan.

Tidak menjadi masalah mereka mengkritik perencanaan yang kita buat, tidak apa-apa. Semua masukan kita terima. Kita harus menjadi *solution maker* dalam membuat perencanaan infrastruktur yang berlandaskan keterpaduan antar sektor PUPR. Dengan keterpaduan antar sektor, maka pengembangan wilayah akan dapat terwujud dengan baik.

Dalam membuat perencanaan, BPIW diminta jeli dengan kondisi yang ada, termasuk masalah lingkungan. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu?

Memang iya dibutuhkan kejelian dalam menganalisis kondisi yang bersifat dinamis, untuk itu kita juga harus menjawab hal itu dengan tim satuan tugas. Kita juga dapat menggabungkan program nasional dengan kebutuhan daerah, asal masih dalam koridor perencanaan.

“Kita harus menjadi solution maker dalam membuat perencanaan infrastruktur yang berlandaskan keterpaduan antar sektor PUPR. Dengan keterpaduan antar sektor, maka pengembangan wilayah akan dapat terwujud dengan baik”

BPIW beberapa waktu lalu membuat program yang bersifat *new initiative* atau inisiatif baru. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal itu?

New initiative merupakan upaya BPIW untuk menjawab direktif Menteri PUPR. Jadi program maupun perencanaan yang kita buat benar-

benar berdasarkan kondisi terkini sesuai dengan arahan Bapak Menteri. Termasuk dalam membuat Renstra 2020-2024. Pokoknya BPIW harus berperan lebih jauh diluar kegiatan rutin.

Pola pikir pemerintahan sekarang adalah pekerjaan itu dimulai dari mimpi, direncanakan, kemudian disiapkan anggarannya untuk direalisasikan. Contohnya membuat Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Mulanya itu merupakan mimpi untuk membuat PLBN yang berkelas internasional, namun tidak menghilangkan kearifan lokal. Kita beberapa PLBN sudah diresmikan Presiden penggunaannya.

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR berbasis wilayah. Bagaimana melihat bahwa pembangunan berbasis wilayah benar-benar diwujudkan ?

Melihatnya dari sisi pencapaian atau hasil dari perencanaan yang dibuat.

Perlu ada ukuran yang jelas seperti apa kondisi suatu perencanaan sudah terlihat hasilnya. Waktu pelaksanaan Pra Konsultasi Regional kita sudah buat kegiatan-kegiatan yang terintegrasi, itulah wujud dari kewilayahan. Jadi bukan lagi sifatnya sektoral, tapi semua terintegrasi termasuk juga dengan kementerian lain.

Kita bangun koridor-koridor pengembangan suatu wilayah bersama pemerintah daerah dan instansi lainnya, seperti Selingkar Wilis. Beberapa daerah yang akan dikembangkan di kawasan ini adalah Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan Kediri.

Namun pengembangan suatu wilayah harus mempertimbangkan beberapa hal seperti sentra produk pertanian. Sebagaimana kita ketahui, khususnya di Pulau Jawa yang merupakan sentra produk pertanian. Jadi perencanaan yang dibuat BPIW harus mendukung sentra-sentra produk pertanian sehingga dapat dipastikan kelangsungannya dan jangan lupa juga jalan – jalan akses untuk pemasaran hasilnya. Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam membuat perencanaan, kita jangan melupakan kearifan lokal misalnya dengan menjaga keaslian tradisi masyarakat di suatu daerah. Selain itu dalam pembangunan juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang timbul akibat dibangunnya Infrastruktur. Misalnya dalam perencanaan jalan tol baru, dipertimbangkan untuk tidak banyak menggusur lahan pertanian, juga mempertimbangkan keberadaan kegiatan ekonomi masyarakat (warung-warung dan lain-lain) yang terdampak adanya jalan tersebut.

Hal itu penting, karena salah satu dari Nawacita adalah tentang ketahanan pangan, karena lahan khususnya di Pulau

Jawa yang sangat subur sangat sulit disamai oleh Pulau – pulau lain di Indonesia.

Serta kenapa kearifan lokal dan budaya setempat perlu juga dipertimbangkan dalam pembangunan, karena Indonesia dikenal sebagai suatu Negara yang memiliki banyak ragam budaya dan tradisi jangan sampai hilang. Indonesi dikenal sebagai negara agraris. Banyak lahan pertanian tradisional dengan terrasingnya yang menarik. Jangan lupa itu menjadi ciri khas Indonesia.

Bahkan dalam mendukung pariwisata, kita harus tetap menonjolkan keaslian daerah, karena para wisatawan

terutama dari mancanegara ingin berpetualang dengan kondisi asli suatu daerah, misalkan hutan yang rindang dan rumah pohon. Mereka terlalu bosan dengan fasilitas mewah hotel berbintang.

Bagaimana menselaraskan perencanaan infrastruktur dengan program nasional ?

Program nasional kita masukkan ke dalam Renstra Kementerian PUPR. Dalam membuat Renstra

tersebut kita mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perencanaan yang kita buat tidak keluar dari itu, dan kita selalu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Apa yang menjadi target Bapak kedepan ?

Rapermen Ripi harus jadi, termasuk Sibas Ripi. *Masterplan* dan *development plan* kita uraikan disitu. Itu target saya di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR. Bila itu sudah jalan optimal, baru kita bisa bicara bahwa inilah BPIW. **(Hendra/Indira)**

“New initiative merupakan upaya BPIW untuk menjawab direktif Menteri PUPR. Jadi program maupun perencanaan yang kita buat benar-benar berdasarkan kondisi terkini sesuai dengan arahan Bapak Menteri. Termasuk dalam membuat Renstra 2020-2024. Pokoknya BPIW harus berperan lebih jauh diluar kegiatan rutin”



“Sebagaimana kita ketahui, di Pulau Jawa banyak area pertanian yang menjadi sentra-sentra produk pertanian. Jadi perencanaan yang dibuat BPIW harus mendukung sentra-sentra produk pertanian sehingga dapat dipasarkan. Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat”

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini dua potongan pemberitaan terpilih pada bulan April.

Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook

Infrastruktur bagi Papua

Infrastruktur adalah kunci penting mengatasi isolasi daerah terpencil. Pemerintah membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup.

AGATS, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting untuk mengatasi berbagai masalah di daerah-daerah terisolasi seperti Papua. Karena itu, pemerintah membangun jalan, jembatan, rumah, dan penampung air untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4/2018).

Di kabupaten yang mengalami kasus gizi buruk dan campak dengan 72 anak meninggal dunia pada Januari-Februari lalu, Presiden bersama Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo disambut tarian penyambutan 50 penari. Bombongan Presiden naik helikopter tiba di Pelabuhan Agats pukul 12.45 WIT.

Presiden dikukuhkan sebagai panglima perang Asmat (Cemurru) oleh masyarakat adat. Penyetaraan gelar ditandai dengan penyerahan perahu dayung sepanjang 3 meter kepada Presiden.

Di Agats, Presiden bertemu dengan para ibu dan anak yang mengikuti Program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Aula Wiyata Mandala Asmat serta memimpin proyek infrastruktur jalan, jembatan gantung, fasilitas penampung air baku, dan pembangunan rumah rakyat di Kampung Kaye.

Menurut Presiden, pemerintah berkomitmen menghadirkan infrastruktur memadai untuk membuka isolasi daerah-daerah terpencil di Papua.

Di Asmat, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jembatan gantung dan jalan mengitari Agats sepanjang 12 kilometer, 9 unit fasilitas penampung air baku, dan 1.000 rumah.

Pembangunan infrastruktur di sektor transportasi dan telekomunikasi sangat penting di Papua. "Infrastruktur transportasi di Asmat adalah dermaga-dermaga. Saya juga akan menginstruksikan agar gangguan jaringan telekomunikasi segera diperbaiki," ujarnya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Asmat Olo Amlessa mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk menghadirkan infrastruktur, tenaga medis, dan obat-obatan secara maksimal di Asmat. "Kami berharap tak terjadi lagi kejadian luar biasa gizi buruk dan campak di Asmat. Perlu pendampingan rutin agar masyarakat dapat menjaga pola hidup bersih dan sehat," tutur Olo.

Holtekamp

Sebelumnya, Kamis pagi, Presiden mengunjungi proyek Jembatan Holtekamp di Jayapura. "Jembatan ini akan memperpendek jarak dari Kota Jayapura menuju Skouw yang biasanya ditempuh 2,5 jam menjadi 1 jam," kata Presiden. Joko Widodo ia didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Presiden mengatakan, dengan bentang 732 meter, Jembatan Holtekamp menjadi salah satu jembatan panjang di Indonesia. Presiden berharap jembatan itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan yang dibungkam. Presiden juga berharap kawasan di sekitar Jembatan Holtekamp menjadi daerah tujuan wisata.

Menurut Basuki, pembangunan Jembatan Holtekamp memiliki beberapa tujuan. Pertama, sebagai sarana pengembangan Kota Jayapura yang telah padat. Selain itu, mendo-

kung pengembangan kawasan Skouw yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.

Menurut Basuki, pembangunan Jembatan Holtekamp memperlihatkan kerja sama dan komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Jayapura.

Bentang utama jembatan dan jalan akses sisi Holtekamp didanai pemerintah pusat. Dua jembatan bentang pendek didanai Pemerintah Provinsi Papua. Sementara jalan akses sisi Hamadi didanai Pemerintah Kota Jayapura.

Jika berjalan sesuai rencana, akhir Desember 2018 semua Jembatan Holtekamp dapat difungsikan. Jika tidak, paling lambat difungsikan awal 2019.

Trans-Papua

Di Sorong, pemerintah telah menyelesaikan jalan Trans-Papua. Tahun 2017, Trans-Papua di Papua Barat sepanjang 1.070,62 km telah tembus.

"Fokus tahun ini sampai 2019 menuntaskan perbaikan tingkat kemiringan jalan serta membangun jembatan permanen ataupun semipermanen," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, Papua Barat, Yohannis Tulak Todingrara di Sorong.

Trans-Papua di Papua Barat terdiri atas 2 segmen. Segmen 1, Sorong-Maybrat-Manokwari, sepanjang 594,81 km, sudah tersambung. Namun, perlu dibangun empat jembatan. Di segmen kedua, Manokwari-Wasior-Batas, Provinsi Papua, sepanjang 475,81 km juga tersambung. Masih ada 125 jembatan belum dibangun. Di dua segmen itu, sebagian jalan diaspal, sebagian masih jalan tanah. (PLO/NAD)





Ulasan Teropong Media yang pertama di edisi kali terkait berita di Kompas pada Jumat, 13 April 2018, yang diberi judul "Infrastruktur bagi Papua". Berikut ulasannya:

Kementerian PUPR Siapkan Program Infrastruktur Untuk Papua di 2019

Dalam berita yang ada di koran itu disebutkan mengenai pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting untuk mengatasi berbagai masalah di daerah-daerah terisolasi seperti yang ada di Papua.

Disebutkan juga bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek jembatan Holtekamp di Jayapura. Jembatan ini akan memperpendek jarak dari Kota Jayapura menuju Skouw yang biasanya ditempuh 2,5 jam menjadi 1 jam. Jokowi berharap dengan adanya jembatan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan dan dapat menjadi daerah tujuan wisata.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian PUPR telah berkomitmen mewujudkan pesan Nawacita yakni membangun dari pinggiran, salah satunya Papua, yang merupakan pulau terujung dari Indonesia. Dalam Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di Kendari (21-23 Februari) lalu juga dibahas mengenai program infrastruktur tahun 2019 di Papua, termasuk juga wilayah Sulawesi, dan Maluku.

Beberapa isu strategis di Papua untuk tahun 2019 seperti penyediaan infrastruktur air baku, pengendalian daya rusak air, air minum, sanitasi dan penanganan kumuh untuk mendukung KSPN Raja Ampat, dan penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua (Nabire- Enarotali, Lanny Jaya-Jayawijaya).

Kemudian juga ada pembangunan prasarana dasar permukiman Asmat dan dukungan air baku, pengaman pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-

pulau kecil terluar. Selanjutnya juga ada pembangunan dan dukungan konektivitas serta air baku untuk PLBN Sota- Merauke.

Untuk program 2019 yang mendukung kawasan industri di Teluk Bintuni seperti Pengendalian Banjir Sungai Tubhi di Kab. Teluk Bintuni. Selain itu ada Pembangunan Baru/ Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di kabupaten tersebut. Dukungan Kementerian PUPR juga terkait pengembangan perbatasan negara yakni Perbatasan Papua-Merauke.

Dalam membangun infrastruktur tahun deoan di Papua, Sulawesi, dan Maluku, Kementerian PUPR memiliki enam prioritas. Keenam prioritas itu yakni, pertama, pelaksanaan pekerjaan yang sudah *committed* yakni proyek *multiyears*, *Middle Years Programme* (MYP) maupun proyek dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Prioritas kedua yakni pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Selanjutnya, prioritas yang ketiga adalah pembangunan konektivitas antar wilayah, kawasan perbatasan Kalimantan dan NTT, dan Jalan Trans Papua.

Prioritas yang keempat adalah program kerakyatan seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGA), Jembatan Gantung, Kota Tanoa Kumuh (Kotaku), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISSEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Untuk prioritas yang kelima adalah pembangunan dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman dan perumahan. Sedangkan prioritas yang keenam adalah pembangunan berbasis kawasan strategis.

Dengan keterpaduan dan sinkronisasi program yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait infrastruktur PUPR diharapkan program infrastruktur sektor PUPR dapat berjalan optimal.

Ulasan Teropong Media yang kedua di edisi kali terkait artikel di Investor Daily pada Rabu, 18 April 2018, yang diberi judul “Menuju Destinasi Wisata Dunia”. Berikut ulasannya:

Kementerian PUPR Ikut Mendukung Pengembangan Wisata di Tanah Air

Artikel yang ada di media tersebut merupakan tulisan dari Joko Tri Haryanto. Dikatakannya pada periode Januari-Oktober 2017, pertumbuhan pariwisata Indonesia hanya kalah dari Vietnam sebagai jawara utama pariwisata di ASEAN. Indeks daya saing pariwisata Indonesia juga terus membaik.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan pariwisata melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Program tersebut untuk mempercepat target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019 mendatang. Pemerintah memprioritaskan pembangunan pariwisata di 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kesepuluh KSPN tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika/Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Kemudian ditambah dua KSPN yakni Toraja (Sulawesi Tenggara) dan Mandeh (Sumatera Barat).

Kini dari 10+2 KSPN itu, pemerintah lebih fokus pada penanganan tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika/Lombok. Untuk 3 KSPN tersebut, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur.

Dukungan infrastruktur PUPR untuk mendukung kawasan Danau Toba seperti proses pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Sedangkan untuk pengembangan kawasan Borobudur, dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR seperti pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Dukungan infrastruktur PUPR di kawasan Mandalika, seperti pembangunan Jalan Gerung menuju Mataram sepanjang dua kilometer dan peningkatan kualitas kawasan kumuh di sekitar Mandalika.

Di sisi lain, Pemerintah memandang perlu mengintegrasikan *masterplan* atau rencana induk terkait

pariwisata dari beberapa instansi pemerintah atau kini dikenal dengan nama “*Integrated Tourism Masterplan program* (ITMP)”. Sebagaimana diketahui bahwa ITMP merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta rencana program *Infrastructure for Tourism*.

Bank Dunia memberikan bantuan sebesar 300 juta dolar Amerika. Dari jumlah itu Kementerian PUPR mendapat alokasi dana kurang lebih 261 juta dollar. Sisanya untuk BKPM dan Kementerian Pariwisata. Bantuan ini akan digunakan untuk kegiatan *soft ware* seperti penyusunan *masterplan*, kegiatan fisik untuk membangun jaringan jalan dan infrastruktur dasar, serta pengembangan investasi dan penyiapan SDM pariwisata. Saat ini Bank Dunia dan pemerintah Indonesia telah menyepakati substansi *Loan Agreement* atau Perjanjian Pinjaman pengembangan tiga KSPN tersebut.

Sejak tahun lalu Kementerian PUPR diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengawal proyek pengembangan pariwisata di Indonesia atau *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) bersama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut ambil bagian dari upaya mengembangkan kawasan wisata di tanah air. Bahkan BPIW diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk menyusun ITMP. Dalam menyusun ITMP ini BPIW selalu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Pariwisata maupun Bappenas.

Dengan keterpaduan berbagai instansi pemerintah termasuk Kementerian PUPR dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia, maka bukan tidak mungkin, Indonesia akan menjadi destinasi wisata dunia. **(Hendra Djamal)**



Tujuh Strategi Agar Program Infrastruktur Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi. Agar percepatan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, menurut Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Lana Winayanti ada tujuh strategis yang diterapkan Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR juga memiliki strategi untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tepat waktu yakni dengan meningkatkan komitmen antara pusat dan daerah.

Pertama, keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Strategi kedua menurut Lana adalah

meningkatkan dukungan pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan *readiness criteria* (kriteria kesiapan) yang menjadi tanggung jawab daerah.

Strategi ketiga yang diterapkan Kementerian PUPR menurut Lana adalah pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional menjadi satu kesatuan sistem yang memerlukan sinkronisasi prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kementerian PUPR juga memiliki strategi untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tepat waktu yakni dengan meningkatkan komitmen antara pusat dan daerah. Strategi keempat itu dilakukan, demi keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR.

"Strategi yang kelima yang dapat dilakukan adalah peningkatan peran daerah dalam meningkatkan kualitas pemrograman diantaranya melalui perencanaan, penyiapan dan penetapan lokasi kegiatan yang



Plt. Kepala BPIW Kementerian PUPR Lana Winayanti

Sumber: Dok. BPIW

signifikan sehingga dapat berdampak terhadap kawasan prioritas," ungkap Lana, (11/4).

Strategi keenam yakni mendorong kreativitas dan inovatif pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan diluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peningkatan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan aset, khususnya setelah tahap konstruksi, menjadi strategi yang ketujuh untuk mencapai program infrastruktur PUPR tepat sasaran dan tepat waktu.

Untuk jangka pendek menurut Lana, beberapa pembangunan yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur PUPR ke depan seperti pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah, Kawasan Perbatasan

Kalimantan Dan Nusa Tenggara Timur, dan Jalan Trans Papua.

Program kerakyatan menurut Lana juga menjadi bagian dari fokus pembangunan infrastruktur sektor PUPR seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

Untuk jangka pendek menurut Lana, beberapa pembangunan yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur PUPR ke depan seperti pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi.

(P3TGAI), Jembatan Gantung, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). "Program prioritas yang tak kalah penting adalah pembangunan dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman dan perumahan, pembangunan berbasis kawasan strategis, dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah committed seperti program multiyear," ungkapnya.

la berharap pembangunan infrastruktur PUPR kedepan, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui pembangunan wilayah dan perkotaan yang mengedepankan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. **(Hen/ infobpiw)**

Kementerian PUPR Siapkan Infrastruktur Pendukung Bandara Baru di Yogyakarta

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tepatnya, pengembangan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dengan akan hadirnya Bandara Kulon Progo.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo menyatakan, ada kebutuhan infrastruktur PUPR yang bersifat prioritas untuk pengembangan NYIA, yakni pembangunan jalan, penyediaan air baku dan rumah khusus.

"Infrastruktur PUPR yang dibutuhkan tersebut, antara lain akses penghubung Bandara (Kulon Progo,-red) Borobudur, akses Bandara (Kulon Progo,-red) Kota Yogyakarta. Kemudian, pembangunan Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul dan *intake* untuk pemenuhan air baku jangka pendek,"

ungkap Bobby saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di ruang rapat BPIW, Jakarta, Selasa (24/4) siang.

Kemudian, lanjutnya, kebutuhan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo untuk pemenuhan air baku jangka panjang serta pembangunan

kemacetan dan kawasan kumuh. "Untuk itu, Kota Yogyakarta membutuhkan dukungan *fly over* atau *underpass* Kentungan untuk membantu mengurai kemacetan serta penanganan kawasan kumuh tepi sungai di Winongo, Code, Gajah Wong dan Tambakbayan," paparnya.

Selain itu, ada dukungan Kementerian PUPR untuk DIY pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 antara lain, pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa yakni Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel dan pembangunan jalan lingkaran Kota Yogyakarta.

Kemudian juga peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak serta anak sungai Gunung Kidul.

"Ada juga rehabilitasi dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo, pembangunan pengendali Sedimen Sleman. Termasuk

Ada kebutuhan infrastruktur PUPR yang bersifat prioritas untuk pengembangan NYIA, yakni pembangunan jalan, penyediaan air baku dan rumah khusus

rumah khusus bagi masyarakat yang rumahnya terdampak dari pembangunan Bandara Kulon Progo.

Bobby menambahkan, saat ini Kota Yogyakarta juga dihadapkan dengan permasalahan perkotaan, seperti



Jajaran BPIW Kementerian PUPR saat menerima kunjungan kerja DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Dok. BPIW

pembangunan kantong lahar Kali Gendol Sleman," ujar Bobby. Ia menambahkan, dukungan rehabilitasi pengendali sedimen di Sleman, pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo, rehabilitasi muara sungai Kulon Progo.

"Termasuk pembangunan Waduk Karang Talun Sleman, pembangunan waduk Gunung Kidul dan lainnya," ujar Bobby.

Bobby juga menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur menggunakan metode berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan menjadi 35 WPS.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan mengakui, kunjungan kerja rombongan DPRD

DIY ke BPIW membawa aspirasi untuk pengembangan NYIA. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat memang sudah banyak memberikan dukungan pengembangan infrastruktur, namun

“Kami berharap kunjungan ini direspon dengan dukungan infrastruktur yang terus meningkat dari Kementerian PUPR, agar masyarakat di DIY dapat semakin sejahtera dan menikmati hasil pembangunan ini,” tegas Dharma.

dukungan tersebut ke depan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Mengingat masih banyak potensi yang dimiliki DIY untuk dikembangkan, mulai dari pariwisata, agribisnis dan lainnya.

Menurutnya, DPRD DIY secara resmi

telah menyampaikan surat resmi kepada BPIW Kementerian PUPR mengenai hal ini. "Kami berharap kunjungan ini direspon dengan dukungan infrastruktur yang terus meningkat dari Kementerian PUPR, agar masyarakat di DIY dapat semakin sejahtera dan menikmati hasil pembangunan ini," tegas Dharma. **(ris/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Prioritaskan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas di Kalteng

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan sistem konektivitas nasional di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019

Penguatan daya saing bangsa difokuskan pada peningkatan konektivitas daratan dan maritim serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.

sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Salah satunya dengan melakukan dukungan terhadap konektivitas nasional. "Gunanya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global," ungkap Agusta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Provinsi Kalteng, Kamis (5/4).

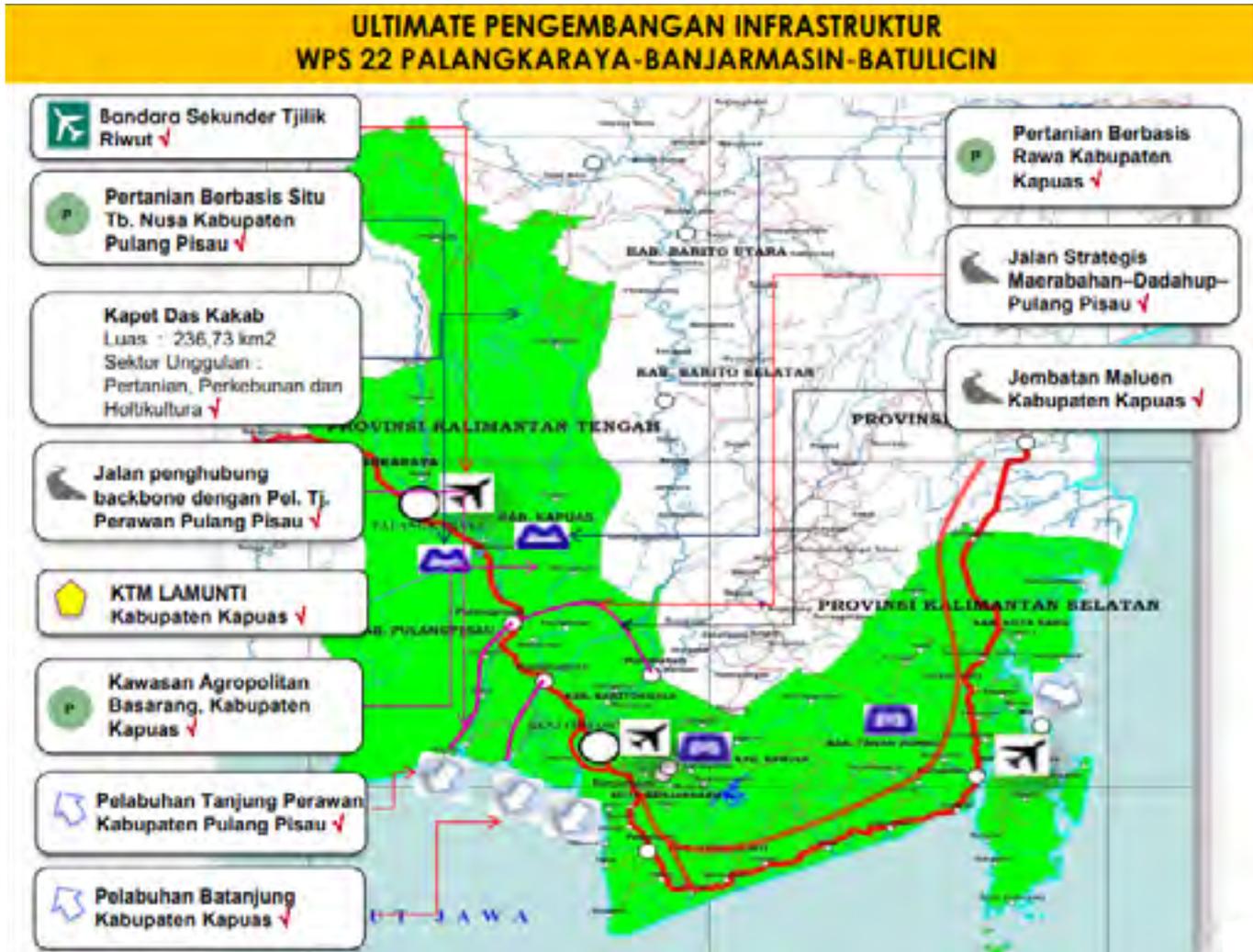
Ia mengatakan, penguatan daya saing bangsa difokuskan pada peningkatan konektivitas daratan dan maritim serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR juberencana melakukan peningkatan aksesibilitas antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta beberapa pembangunan jembatan.

"Direncanakan dilakukannya pembangunan infrastruktur dasar yang tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalteng," lanjut Agusta.

Di tempat sama, Gubernur Kalteng, Sugiono Sabran mengakui, dukungan pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah sangat diperlukan Kalteng.

Ia menyatakan, Pemprov Kalteng menggelar Musrenbang untuk menggali masukan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalteng tahun 2018 yang mengangkat tema "Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah".

Menurutnya, Kalteng memiliki potensi alam yang besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Oleh sebab itu dibutuhkan aksesibilitas yang



baik untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

"Keberadaan suku pedalaman juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam penyediaan sarana dan parasana dasar yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah daerah," tutur Sabran.

Di tempat sama, Lisbon Sirait yang mewakili Kementerian Keuangan turut menambahkan, pembiayaan infrastruktur melalui APBN sangat terbatas, sehingga dibutuhkan mekanisme pembiayaan melalui sumber lainnya. Salah satunya dengan melaksanakan Kerjasama

Pemerintah Badan Usaha (KPBUs) atau menggunakan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), mengingat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat banyak perusahaan besar.

"Keberadaan suku pedalaman juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam penyediaan sarana dan parasana dasar yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah daerah," tutur Sabran.

Musrenbang ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, dan Ir. Antonius Tonny Budiono, MM, Staf Ahli

Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan.

Kemudian juga dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, serta para Bupati dan Walikota, Tokoh Adat Dayak, lembaga swadaya masyarakat, dan dinas terkait. (miq/infobpiw)

Dukung Capaian Organisasi, BPIW Tingkatkan Etos Kerja Pegawai

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki salah satu fungsi sebagai lembaga kajian dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk pimpinan, sehingga jajaran BPIW harus banyak diskusi dan banyak berpikir.

Demikian disampaikan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu saat membuka acara Penguatan Etos Kerja dalam Mendukung Capaian Organisasi di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Firman menuturkan, jajaran BPIW juga harus cakap dalam melakukan komunikasi. "Kita harus mampu menyampaikan sesuatu dengan terbuka dengan kompetensi kita masing-masing. BPIW bergantung pada kemampuan setiap individu

di dalamnya untuk menyampaikan sesuatu, walaupun tetap satu pengambil keputusan yaitu kepala badan," terang Firman.

Dalam acara yang dihadiri PNS di Lingkungan BPIW ini, Firman menjelaskan, latar belakang bagaimana berbicara dan bagaimana

menurut Firman pola komunikasi yang disampaikan dapat memperkuat etos kerja, mendukung capaian organisasi.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Becky Tumewu dari Talk Inc. Ia menjelaskan tingkat kenyamanan seseorang dalam berkomunikasi sangat bergantung dengan banyak hal.

BPIW saat ini dituntut cepat, kreatif dan inovatif dan langsung bisa berinteraksi dengan masyarakat

"*Mood* kita, siapa yang kita ajak berbicara dan hal-hal lainnya berpengaruh terhadap kenyamanan kita, kalau kita menemui *audience* yang kita pikir lebih dari kita biasanya hal itu akan menurunkan rasa percaya diri kita," jelasnya.

menyampaikan pikiran. "Itu akan menjadi suatu pengalaman dan proses yang akan memberikan pengajaran kepada kita," jelasnya.

BPIW saat ini dituntut cepat, kreatif dan inovatif dan langsung bisa berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu

Becky mengungkapkan, rasa percaya diri dosisnya harus sesuai dan harus tepat. "Untuk mendapatkan rasa percaya diri yang tepat, kita harus mendapatkan *self concept* (konsep diri) yang dapat kita gambarkan kepada orang menjadi *self esteem*, *self image* dan *social image*," ungkapnya.



Becky Tumewu berbagi ilmu dengan pegawai BPIW agar dapat melakukan komunikasi yang positif

Sumber: Dok. BPIW

"Self confidence akan timbul bila kita memiliki konsep diri yang kuat, utuh tentang diri kita, yang dibentuk oleh banyak hal termasuk pengalaman dan peristiwa yang kita alami," lanjut Becky.

Becky menerangkan, harus ada persiapan agar rasa percaya diri keluar dengan benar dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat.

"Percaya diri harus ada modal, kalau tidak ada modal namanya nekat. Di saat anda profesional dalam menjalankan tugas, hal itu akan berbuah baik bagi diri anda," jelasnya.

Becky menambahkan, berpikiran positif akan membangun rasa percaya diri yang sehat terutama jika bisa menghargai orang lain. "Kita bisa menghargai orang lain dengan

mendengarkan apa yang diucapkan nya. Tunjukkan dengan *positive body language*," jelas Becky.

Becky mengungkapkan terkadang *mood* seseorang tidak selalu baik setiap saat, namun ia memberikan tips agar

“Kita bisa menghargai orang lain dengan mendengarkan apa yang diucapkan nya. Tunjukkan dengan *positive body language*,” jelas Becky.

dapat berkomunikasi dengan positif terus menerus yaitu membiasakan diri berkomunikasi dengan positif dan jadikan itu standar berkomunikasi.

Selain itu, Becky menjelaskan cara seseorang berkomunikasi dipengaruhi

dari 10 persen kata, 20 persen suara dan 70 persen visual. Visual terbagi lagi menjadi 60 persen *body language* dan 10 persen total *look*. "*Body Language* itu meliputi *eye contact*, senyuman yang tulus, *gesture* yang baik dan postur tubuh yang baik" jelasnya.

Pada kesempatan ini, Becky juga menjelaskan bagaimana *professional etiquette* (etika) dalam berbagai hal seperti saat memberikan salam, saat sedang rapat, saat menelepon, dan saat mengirim email. ([bri/infoBPIW](mailto:bri@infoBPIW))

Indonesia-Perancis Tindaklanjuti Kerja Sama dalam Perencanaan Perkotaan

Dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerja sama Republik Indonesia (RI)-Perancis dalam bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan, Pemerintah Perancis menghadirkan ahli perencanaan perkotaannya untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan perkotaan.

Kerja sama tersebut diimplementasikan dalam forum "*Strengthening France-Indonesia Cooperation on Urban Planning: Sharing Knowledge in Benefit Analysis of Integrated Infrastructure on Public Works and Housing in Strategic Development Region*" yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan tenaga ahli dari kedua pihak. Dari pihak Perancis, hadir perwakilan dari Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia dan Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan dari *French Environment and Energy Management Agency* (Ademe).

Sementara dari pihak Indonesia, dihadiri oleh sejumlah pejabat dari BPIW yakni dari Pusat Perencanaan Infrastruktur, Pusat Pemrograman dan

Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Selain itu dihadiri unit organisasi lain di Kementerian PUPR seperti Biro PAKLN, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, dan Direktorat Perencanaan Perumahan. Selain itu dihadiri Ditjen Penyediaan Perumahan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, serta Puslitbang Perumahan dan Permukiman PUPR.

Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi manfaat pembangunan infrastruktur terpadu pada sektor sosial, ekonomi, lingkungan dan keuangan di Indonesia.

"Kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan metode dan *tools* untuk mempertajam analisis manfaat dari pembangunan infrastruktur terpadu di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)," ujar Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Analisis Manfaat BPIW, Zevi Azzaino, yang hadir mewakili Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR.

Menurutnya, pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia saat ini masih menghadapi beragam tantangan. Hal itu terlihat dalam Indek Daya Saing Global Indonesia yang tahun 2016-2017 menempati rangking 41 dunia dan tahun 2017-2018 menempati rangking 36 dunia. Menurut Zevi beragam inovasi sangat diperlukan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Zevi mengatakan, saat ini perkembangan kota di Indonesia

cenderung tumbuh dengan cepat. Hal ini terjadi seiring tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan.

Akibatnya, permasalahan yang dihadapi perkotaan semakin beragam



Forum Kegiatan kerjasama Republik Indonesia-Perancis

serta tingginya permintaan dan kebutuhan layanan infrastruktur.

Untuk itu, arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR telah ditetapkan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni meningkatkan keandalan infrastruktur dalam memenuhi ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Kemudian, konektivitas untuk memperkuat daya saing, layanan infrastruktur dasar, dan pengembangan

Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi manfaat pembangunan infrastruktur terpadu pada sektor sosial, ekonomi, lingkungan dan keuangan di Indonesia.

terpadu antar-daerah, antar-sektor serta tingkat antar-pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, BPIW, Eko Budi Kurniawan mengatakan saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi yang terintegrasi antar kementerian dalam merencanakan ruang. Ia juga menyatakan standar pelayanan kota cerdas berkelanjutan dapat diukur dari beberapa indikator antara lain, kehidupan cerdas yang berkelanjutan, ekonomi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan.

Kemudian juga lingkungan ekologi

program dan kegiatan Kementerian PUPR harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur manfaat dan keberhasilannya. Di lain pihak, Ahli Perencanaan Perwakilan Ademe, Amandine, mengungkapkan, terminologi tingkat administrasinya. Pemerintah Perancis dalam menerapkan perencanaan perkotaan memiliki konseptualisasi yang berbeda dengan Indonesia. Proses Perencanaan di Perancis dimulai dari lingkup terkecil yaitu kota (*communes*) hingga lingkup nasional (*Sraddet*).

"Pemerintah Perancis menerapkan AEU2 (*Environmental Urban Approach*) yang merupakan metodologi untuk

hayati di dalam area pembangunan.

Sementara itu, *circular economic* adalah pendekatan untuk mendefinisikan kembali produk dan layanan untuk mendesain limbah dengan meminimalkan dampak negatif dengan

Pertemuan tersebut juga berhasil memunculkan beberapa hasil penting. Salah satu diantaranya adalah penggunaan indikator oleh pemerintah Perancis untuk mengembangkan wilayah identik dengan pendekatan yang dilakukan oleh BPIW

cara memanfaatkan limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual.

Berkenaan dengan konsep WPS yang menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengembangkan wilayah tersebut, *Ecology Corridor* dapat dipertimbangkan untuk digunakan.

Pertemuan tersebut juga berhasil memunculkan beberapa hasil penting. Salah satu diantaranya adalah penggunaan indikator oleh pemerintah Perancis untuk mengembangkan wilayah identik dengan pendekatan yang dilakukan oleh BPIW, seperti melihat dari sisi Produk Domestik Bruto, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Adapun arahan Ademe untuk kegiatan analisa manfaat yang dilakukan oleh BPIW adalah perlu melakukan analisis terhadap wilayah yang dipilih terlebih dahulu dengan melengkapi data-data penunjang seperti data tentang ekonomi, ekologi, dan populasi guna menghasilkan analisa manfaat yang lebih baik.

Ademe juga mengusulkan penggunaan indikator lingkungan seperti tingkat pencemaran terhadap polusi udara, polusi suara, polusi tanah, energi, perubahan iklim, ekosistem, air, dan limbah. **(Marina/infobppiw)**



Sumber: Dok BPIW

cerdas yang berkelanjutan, dan tata kelola komunitas yang cerdas dan berkelanjutan. Sasaran dan standar pelayanan kota cerdas berkelanjutan menurutnya antara lain kehidupan cerdas yang berkelanjutan, ekonomi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, lingkungan ekologi cerdas yang berkelanjutan, tata kelola komunitas yang cerdas dan berkelanjutan.

Untuk itu, perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah yang diimplementasikan dalam bentuk

membantu membangun perencanaan kota yang berkelanjutan dengan empat tahapan kunci yaitu visi, tujuan, transkripsi, dan realisasi," ungkap ahli perkotaan Ademe tersebut.

Sejumlah isu menarik berhasil diungkapkan dan dibahas pada pertemuan tersebut. Beberapa isu yang muncul antara lain *ecology corridor* adalah pendekatan untuk mendukung tujuan kota cerdas yang berkelanjutan dengan melindungi keanekaragaman

Program Infrastruktur 2019 Direalisasikan Melalui Keterpaduan Antarsektor dan Antar Pemerintah

Pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarpemerintah, seperti yang akan dilakukan di Provinsi Jambi.

Menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian

PUPR, Bobby Prabowo terdapat beberapa pembangunan usulan keterpaduan antarsektor PUPR di provinsi Jambi.

"Keterpaduan antarsektor ini merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg, yang telah digelar di Kota Jambi, 7-9 Maret lalu," ujar Bobby saat memberikan paparan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi, Kamis (5/4).

Lebih lanjut ia menjelaskan program usulan keterpaduan antarsektor internal PUPR itu yakni dukungan Ditjen

Cipta Karya berupa drainase dan jalan lingkungan pada 50 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kawasan Lagok-Kota Jambi yang telah dibangun oleh Ditjen Penyediaan Perumahan.

Usulan berikutnya terkait penataan kawasan candi oleh Ditjen Cipta Karya pada pembangunan rumah khusus yang telah dilakukan di Kawasan Candi Muaro Jambi.

Bobby menegaskan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Keterpaduan antar pemerintah diwu-

Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

PROGRAM HASIL PRA KONREG TA. 2019



- 
 - Pembangunan jaringan Perpipaan Zona Timur Kota Jambi
 - Pembangunan TPA Kota Jambi
 - Pemetaan KAWA Wisata Geopark Merangin dan Sistem Drainase & Transfer System
- 
 - Pembangunan Rumah Susun MBR/ Wukaf Kab. Muara Jambi 3 Lantai Jambi - Suk. Km. 50 Desa Pertanian
 - Pembangunan Rumah Khasus Nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 
 - Pembangunan Bendung Batang Asai (MRC) Kab. Sarolangun
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Batang Sangkir Kab. Kerinci
 - Revitalisasi Danau Kerinci Kab. Kerinci
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Di Batanghari Kab. Bungo dan Tebo
- 
 - REHABILITASI JALAN BTS PROV. JAWA - MERLING
 - REKONSTRUKSI SP. ZONA LIMA - MUARA SABAK
 - Duplikasi Jembatan Merangin

judkan melalui pemenuhan *readiness criteria* program, peningkatan komitmen antar pusat daerah untuk keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Daerah perlu meningkatkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan aset setelah tahap konstruksi, dan perencanaan serta sinkronisasi pengembangan kawasan," tegasnya.

Bobby berharap pemerintah daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan program-program utama hasil kesepakatan Pra Konreg untuk program 2019, seperti di sektor Sumber Daya Air terdapat pembangunan Bendung Batang

Asai dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Batang Sangkir Kab. Kerinci. Selanjutnya di sektor Bina Marga ada Rekonstruksi SP. Zona Lima - Muara Sabak dan Duplikasi Jembatan Merangin.

Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kab. Batanghari dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kab. Muara Jambi. Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Zumi Zola mengungkapkan bahwa untuk tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan program pembangunan jalan.

"Pembangunan jalan kita dorong menjadi salah satu program prioritas, kita harus memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Jambi," ucap Zumi.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, para bupati/ Walikota se-Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota Jambi, Anggota DPR RI asal Jambi, dan satuan kerja perangkat daerah. **(Alfin/Hendra/infobpiw)**

Bobby berharap Pemerintah Daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan

Untuk sektor Cipta Karya, program utama 2019 yang menjadi hasil kesepakatan di Pra Konreg tersebut seperti pembangunan Jaringan Perpipaan Zona Timur Kota Jambi dan Penataan Kawasan Wisata Geopark Merangin. Sedangkan untuk sektor perumahan, beberapa program utama seperti Pembangunan Rumah

BPIW Mulai Lakukan Proses Penyusunan Renstra 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019 akan berakhir 2019 mendatang. Selanjutnya, pemerintah dihadapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024. Sehubungan dengan

Renstra Teknokratik merupakan bagian dari proses dari alur penyusunan atau persiapan Renstra Kementerian maupun lembaga. Selain proses teknokratik juga ada proses politik, dan penetapan Renstra.

hal itu setiap kementerian maupun lembaga termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW), Bobby Prabowo menegaskan target dalam Renstra tidak pernah bisa diubah. Target yang ada dalam Renstra harus diupayakan agar tercapai. Hal itu dinyatakannya saat membuka *kick off meeting* penyusunan Renstra Teknokratik di Jakarta, 20 April 2018 lalu.

Renstra Teknokratik merupakan bagian dari proses dari alur penyusunan atau persiapan Renstra Kementerian maupun lembaga. Selain proses teknokratik juga ada proses politik, dan penetapan Renstra.

Renstra Kementerian PUPR yang disusun BPIW berdasarkan RPJMN dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian PUPR, serta serta aspirasi masyarakat.

Bobby berharap proses penyusunan Renstra dapat berjalan dengan baik, sehingga mengarah pada tujuan RPJMN IV (2020-2024) yakni mewujudkan manusia Indonesia yang

Proyek Strategis Nasional Kewenangan Kementerian PUPR

- Proyek Strategis Nasional ini sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ;
- Bertujuan untuk mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non anggaran pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Ia juga menyampaikan beberapa Proyek Strategis Nasional yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR seperti pembangunan 69 Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol, pembangunan rumah susun di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta.

Selain itu pembangunan 53 Proyek Bendungan, dan 8 Proyek Penyediaan Air Minum.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Renstra dan Analisa Manfaat Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW Zevi Azzaino menambahkan, sebelum dilakukan *kick off*, tahun lalu telah

dibuat *background study*. Zevi berharap pada awal pemerintahan baru, 2019 yang akan datang, Renstra sudah siap.

Kegiatan ini juga diisi paparan dari narasumber yakni Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi

Sebelum dilakukan *kick off*, tahun lalu telah dibuat *background study*. Zevi berharap pada awal pemerintahan baru, 2019 yang akan datang, Renstra sudah siap.

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Ronald Andrea Annas.

Dikatakannya dalam pelaksanaan pembangunan harus mengarp pada sasaran reformasi birokrasi yakni

birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Kegiatan tersebut diikuti berbagai instansi di lingkungan Kementerian PUPR seperti Ditjen Bina Konstruksi dan Inspektorat Jenderal.

Kemudian dari instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). **(Marina/Hendra/infobpiw)**

Optimalisasi Capaian Kinerja, BPIW Matangkan *New Initiative* 2019

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan usulan *New Initiative* (inisiatif baru,-red) tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk optimalisasi capaian kinerja BPIW pada tahun-tahun mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, inisiatif baru BPIW tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan program Kementerian PUPR.

"*New Initiative* BPIW ini akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR. Sebab, bersifat penting dalam mempersiapkan program kerja baru di tahun mendatang," ungkap Lana saat menyampaikan Arahan Kebijakan



Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti saat memberikan arahan kepada jajaran BPIW

BPIW dalam "Pembahasan Usulan *New Initiative Program*, Kegiatan dan Anggaran BPIW Tahun 2019" di Jakarta, beberapa waktu lalu.

la juga menjelaskan, selama ini banyak harapan yang dititipkan kepada BPIW dari Kementerian PUPR. Sehingga, BPIW harus bekerja keras dan bekerja kolektif

dalam memenuhi harapan tersebut, guna merealisasikan keterpaduan dan sinkronisasi program PUPR yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan.

Dengan begitu, lanjutnya, BPIW

perlu mengambil peran lebih dalam menjamin keterpaduan perencanaan dan program Kementerian PUPR. "Salah satunya seperti membuat *policy brief* (arahan kebijakan,-red) hasil kajian komprehensif yang dilakukan BPIW, untuk memudahkan pimpinan Kementerian PUPR dalam mengambil kebijakan," terangnya.

Terlebih, Instruksi Presiden pada era saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga dari sisi perencanaan dan pemrograman perlu ikut menyesuaikan. Dengan begitu, BPIW juga dituntut mampu menyesuaikan

ini, perlu mendapat dukungan dari seluruh staf BPIW. Termasuk, pedoman dan KAK (Kerangka Acuan Kerja,-red) dalam menjalankannya. Sehingga, diharapkan dalam mengerjakannya terbentuk irama yang sama dan bersifat kolaboratif," pesan Lana.

Hal senada diungkapkan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H Napitupulu. Menurut Firman, *New Initiative* merupakan langkah BPIW menyampaikan masukan guna menjadi arahan, kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur PUPR.

penanganan DAS Citarum yang kini menjadi isu nasional. Kemudian mendukung wadah kerjasama internasional seperti Kerjasama Sijori

“Tantangan yang dihadapi BPIW saat ini, perlu mendapat dukungan dari seluruh staf BPIW. Termasuk, pedoman dan KAK (Kerangka Acuan Kerja,-red) dalam menjalankannya. Sehingga, diharapkan dalam mengerjakannya terbentuk irama yang sama dan bersifat kolaboratif,” pesan Lana.

(Singapura, Johor dan Riau), yakni pada kegiatan *Collaborative Management Infrastruktur Selat Malaka*.

Selain itu, lanjutnya, *Collaborative Management Infrastruktur* untuk mendukung jalur logistik dan destinasi wisata dunia, yakni untuk ASEAN *Highway Network* dan *One Belt and One Road Initiative* (Obor). **(ris/infoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

dan mampu mengejar target-target yang dicanangkan Presiden.

Lana menuturkan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian BPIW antara lain, Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Transmigrasi, isu Perubahan Iklim dan lainnya. "Tantangan yang dihadapi BPIW saat

Termasuk, dalam penanganan isu-isu strategis nasional.

Firman menjelaskan, untuk *new initiative* BPIW dapat melakukan *Collaborative Management Infrastruktur Daerah Aliran Sungai* (DAS) Citarum.

Hal tersebut sebagai penunjang

Executive Summary

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Wakatobi “World Class Biodiversity”

Sebagaimana ditetapkan di dalam SPP 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, KSPN Wakatobi dsk merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Kendari-Wakatobi dan sekitarnya, serta terintegrasi dengan KPPN Rawa Aopa Watumohai dsk, Kendari dsk, dan Bau-bau dsk. KSPN Wakatobi merupakan bagian

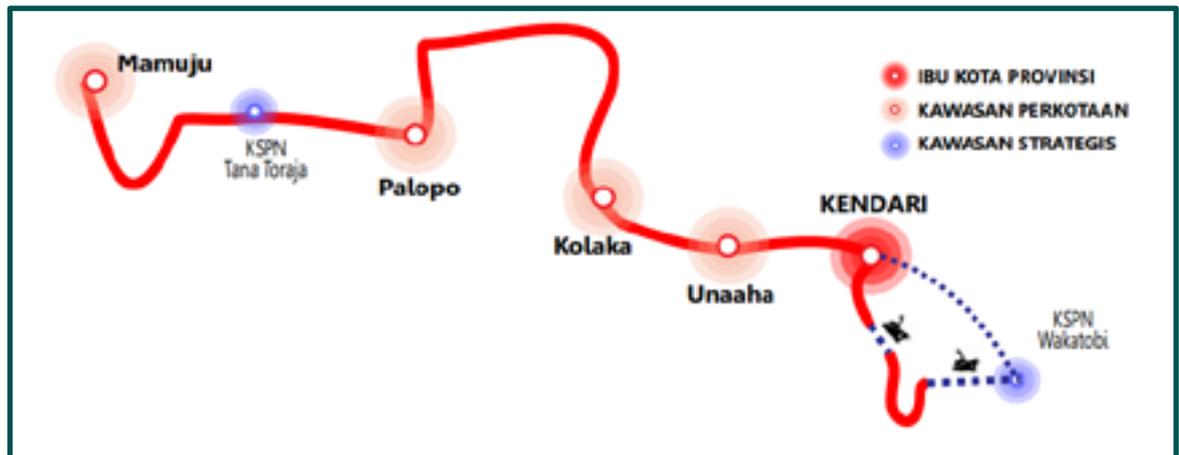
dari WPS 27 yaitu WPS Pertumbuhan Baru Mamuju - Makale - Palopo - Kendari - Baubau Wangiwangi, yang saling terhubung oleh Jalan Nasional sepanjang ±978 km. Backbone pertumbuhan WPS 27 ini di mulai dari Kota Mamuju sampai ke Kawasan Perkotaan Wanci, yang terdiri (urutan) dari Kota Mamuju, kawasan perkotaan Toraja/Toraja Utara, Kota Palopo,

Kota Masamba, Kota Baubau, Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kawasan Perkotaan Wanci. WPS ini disokong 2 pelabuhan nasional/nusantara yang menjadi pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Belang-belang & Pelabuhan Kendari. Selain itu juga terdapat bandara pengumpul yaitu Bandara Haluoleo di Kota Kendari.

KSPN Wakatobi letaknya berada



Gambar 1. KSPN Wakatobi pada WPS 27 Pusat Pertumbuhan Baru Mamuju-Kendari-Wangi-wangi



Gambar 2. KSPN Wakatobi pada Backbone Pusat Pertumbuhan Baru Mamuju-Kendari-Wangi-wangi

di ujung backbone WPS 27 dan berdekatan dengan PKW Bau-bau dan PKN Kendari.

Hal ini yang menjadikan perlu adanya pengembangan di KSPN Wakatobi untuk menangkap peluang efek kegiatan ekonomi yang ada di PKW Bau-bau dan PKN Kendari dan menjadi pusat *trickle down effect* pada wilayah sekitarnya khususnya WPS 27.

Dengan demikian perlu adanya stimulan dan penguatan konektivitas untuk mengakselerasi kemajuan perekonomian pada WPS 27. Penguatan konektivitas tersebut bisa berupa pengembangan infrastruktur baik infrastruktur umum dan khusus di setiap bagian titik embrio penting WPS Mamuju-Kendari-Wangi-wangi.



Trumbu karang di Wakatobi

Sumber: Istimewa

Daya tarik wisata Wakatobi tidak bisa dipungkiri adalah keindahan alam bawah lautnya. Kawasan perairan

Wakatobi merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Wakatobi yang terletak di pusat segitiga karang dunia (*the heart of coral triangle centre*).

Berdasarkan data WWF, hampir 95,87 persen wilayah Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah perairan dengan luas tutupan karang 54.500 Ha. Selain itu, Wakatobi juga memiliki potensi keindahan alam terrestrial dan kebudayaan suku asli; yang semakin melengkapi potensi daya tarik wisata.

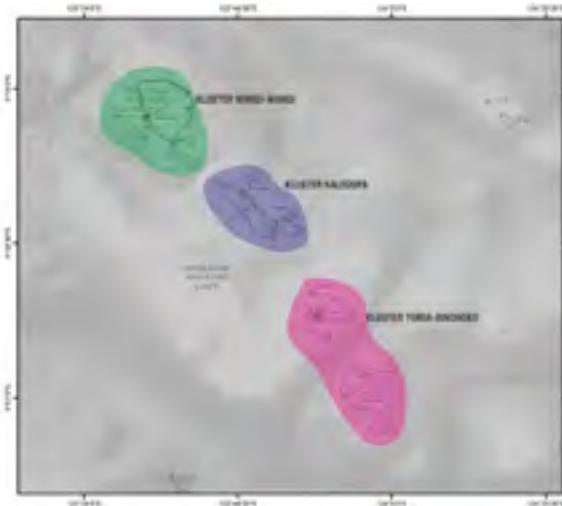
Klaster 1 (Pulau Wangi-wangi dan sekitarnya)

Klaster Pulau Wangi-wangi dan sekitarnya (dskt) merupakan kawasan entry point KSPN Wakatobi yang didukung dengan keberadaan Bandara Matahora dan Pelabuhan Wanci. Daya tarik wisata (DTW) yang ada di Klaster Pulau Wangi - wangi dskt tersebar di dalam pulau utama dan pulau kecil sekitarnya. Pulau Wangi-wangi sebagai Pusat Perkotaan Kab. Wakatobi yang memiliki keindahan yang terpendam

Klaster 2 (Pulau Kaledupa dan sekitarnya)

Pulau Kaledupa sebagai pusat kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang tertutup keindahan Bawah Lautnya. Pulau Kaledupa sendiri memiliki kesuburan tanahnya yang tinggi dan bentuk bentang alamnya berbukit. Kaledupa sendiri dikenal masyarakat Kabupaten Wakatobi adalah masyarakat yang memegang teguh budayanya yaitu budaya Buton. Tetapi

nilai kebudayaan tersebut tertutup dengan keindahan alam bawah lautnya yang terkenal di mancanegara, yaitu Pulau Hoga, yang berada di sebelah Timur pulau utama Kaledupa.



Klaster 3 (Pulau Tomia dan sekitarnya serta Pulau Binongko)

Pulau Tomia sebagai Pusat Wisata Bawah Laut dengan skala Internasional. Memiliki beberapa panorama pantai, puncak dan panorama bawah laut yang dapat memanjangkan mata para wisatawan yang berkunjung. Disamping itu juga penataan perkampungannya yang bersih dan alami serta masyarakatnya yang ramah terhadap para wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. Di pulau ini, para wisatawan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti memancing, berenang, *snorkeling*, dan *diving*.



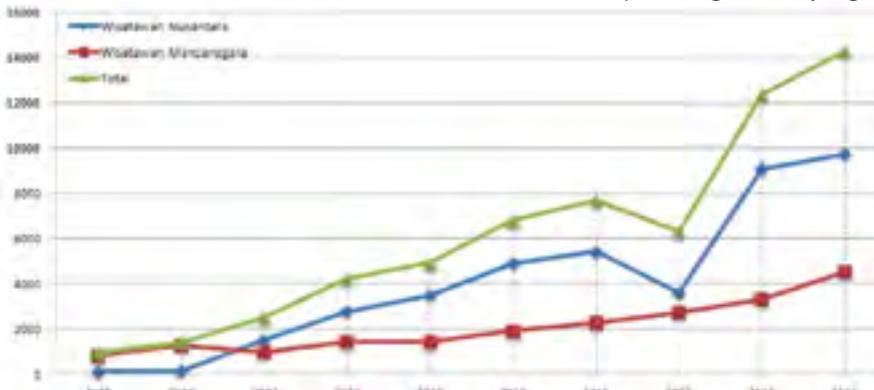
Pulau Binongko tempat terluar yang berkilau. Pemandangan yang terdiri dari bukit-bukit berbatu dan pulau ini dikelilingi oleh tebing. Namun demikian, di antara tebing-tebing, pantai putih yang indah dengan pohon-pohon kelapa alami dapat ditemukan. Selain itu, hutan mangrove dengan

pohon-pohon dengan ketinggian 20 meter, flora menginspirasi dan fauna menunggu untuk dieksplorasi. Mata air yang tak terhitung jumlahnya yang dapat ditemukan hampir di seluruh pulau yang sempurna untuk berenang dan berteduh.

Saat ini, sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah pusat, tingkat kunjungan wisatawan Wakatobi ditargetkan untuk mencapai 500.000 wisatawan asing dan 1.000.000 wisatawan nusantara pada tahun 2019. Target yang besar ini membutuhkan perhatian dan sinergi antar berbagai pihak di daerah maupun dari pusat. Tahun 2016, wisatawan asing sebanyak 20.000 jiwa, dan wisatawan nusantara sebanyak 190.000 jiwa. Tentu saja periode tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan target 2019 sebesar 1,5 juta jiwa atau paling tidak harus dapat membuat 7x lipat lebih besar terhadap capaian tahun 2016. Walaupun tingkat kunjungan

tinggi dan deretan daya tarik wisata yang menarik, Wakatobi tetap perlu berbenah diri untuk bisa mencapai target tersebut; khususnya dalam meningkatkan daya saing pariwisata.

Masyarakat Wakatobi memiliki karakter yang berbeda diantara 4 (empat) pulaunya, dan dari segi pariwisata mereka saling bersaing. Persaingan ini bisa menjadi positif saat mereka saling melengkapi dan berlomba lomba dalam pelayanan kepada wisatawan. Masyarakat wakatobi memiliki latar belakang budaya yang tinggi karena mereka dulunya ada di wilayah kerajaan Buton yang cukup tinggi peradabannya. Tahapan masyarakat wakatobi sendiri ada dalam tahap puncak Euphoria. Masyarakat memandang baik terhadap wisatawan yang datang, namun karena perbedaan budaya terkesan agak buruk, hal ini bukan karena mereka jenuh terhadap wisatawan, hal ini menunjukkan mereka masih belum terbiasa menghadapi para wisatawan, dan belum melakukan komersialisasi terhadap para wisatawan.



Gambar 6. Jumlah Kunjungan Wisatawan



Gambar 7. Tingkat perkembangan kawasan pariwisata Wakatobi

Secara keseluruhan, kunjungan wisata dalam periode 10 tahun tumbuh rata-rata 35,15% per tahun, dimana per tumbuhan rata-rata kunjungan wisnus relatif tinggi yaitu 177,57% per tahun akan tetapi per tumbuhannya sangat fluktuatif. Terdapat lonjakan jumlah kunjungan wisnus pada tahun 2007 dan penurunan yang signifikan pada tahun 2012. Sedangkan laju per tumbuhan kunjungan wisman rata-rata 19,21% per tahun dimana angka per tumbuhan relatif tinggi pada tahun 2006, 2008, 2010 dan 2014.

Jika ditambahkan dengan proyeksi penduduk lokal di kawasan KSPN, maka dapat diperoleh rumusan pertumbuhan pengunjung (wisatawan + penduduk) dalam KSPN Wakatobi. Rumusan tersebut kemudian dapat disilangkan dengan daya dukung lingkungan kawasan, khususnya daya dukung laut, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana seharusnya pengembangan infrastruktur pada KSPN Wakatobi. Perkembangan destinasi terjadi melalui suatu proses atau tahapan. Sangat penting untuk mengenali tingkat perkembangan kawasan pariwisata untuk dapat merencanakan & mengelola pengembangan kawasan tersebut.

Pengembangan infrastruktur jika didasarkan pada laju pertumbuhan pengunjungnya, dapat dikategorikan menjadi beberapa poin pengembangan, yaitu:

- S1** yaitu kondisi awal jika KSPN Wakatobi hanya dikembangkan berdasarkan SPM yang berlaku, tidak dikenai percepatan infrastruktur
- S2** skenario pesimis, dengan proses ini maka pada 2019 Wakatobi dapat mencapai 385.617 jiwa. Kondisi ini adalah dengan mempertahankan kondisi eksisting infrastruktur tanpa adanya dorongan peningkatan infrastruktur.
- S3** skenario moderat, target ini hampir mencapai target Kemenpar pada tahun 2026 yaitu sebesar 4.269.631. Kondisi skenario moderat ini didasarkan pada pengembangan infrastruktur prioritas penanganannya
- S4** skenario optimis, dengan skenario ini maka pada 2026 kunjungan wisatawan akan mencapai 10.699.680 jiwa. Target skenario melebihi target Kemenpar. Skenario ini bisa diwujudkan apabila seluruh rencana program yang ada terealisasi dan pembangunannya selesai sesuai dengan rencana program.
- S5** Pembangunan infrastruktur sebagai atraksi wisata
- S6** Green Tourism Development

Ultimate Goal KSPN Wakatobi



Ultimate Goal pengembangan pariwisata Wakatobi yang diusulkan adalah mewujudkan kawasan Wakatobi sebagai: Destinasi Pariwisata Keanekaragaman hayati yang Mendunia (*World Class Biodiversity Destination*)

Untuk mewujudkan *ultimate goal* tersebut, maka secara prinsip diperlukan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, efisien, dan inovatif. Infrastruktur yang dibangun hendaknya juga atraktif serta dapat dinikmati baik oleh masyarakat lokal, pelaku pariwisata, maupun pengembang. Prinsip-prinsip pengembangan infrastruktur tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:



Ramah Lingkungan

Infrastruktur yang ramah lingkungan adalah penataan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem yang sensitif, keterbatasan lahan dan sumber daya, keberadaan terumbu karang di sekitar pantai, serta budaya setempat. Kekayaan dan keunikan keanekaragamanhayati laut membuat Wakatobi bernilai tinggi, oleh karena itu sebesar-besarnya pembangunan infrastruktur harus tetap mengedepankan pelestarian lingkungan. Aplikasi energi terbarukan, bahan bangunan yang cepat tergantikan, atau teknologi bangunan yang meminimumkan intrusi atau sumber daya harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur.



Efisien

Oleh karena sifatnya yang rentan terhadap kerusakan dan konteks Wakatobi sebagai wilayah taman nasional, maka infrastruktur yang dibangun harus efisien, artinya penggunaan lahan dan sumber daya alam secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum



Inovatif

Di sisi lain, karena tuntutan permintaan untuk menampung kedatangan pengunjung yang tinggi, dibutuhkan inovasi dalam pembangunan insfrastruktur agar tetap ramah lingkungan tetapi memiliki daya tampung yang optimal.

Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Wakatobi



1. Pengembangan Produk Wisata



2. Peningkatan Konektivitas



3. Pengembangan Inkubasi Kawasan



4. Penguatan Institusi Pengelolaan Wisata



5. Desain Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Menjadi Salah Satu Atraksi Wisata



6. Penyediaan Infrastruktur PUPR & Non PUPR



7. Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur



8. Keberlanjutan Lingkungan Pulau Kecil & Pesisir



Dermaga di Wakatobi

Sumber: Istimewa

Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara

2018, Kementerian PUPR Susun MPDP Tiga Kawasan



PLBN Entikong Kalimantan Utara

Sumber: BPIW

*P*embangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kini semakin mendapat perhatian serius. Pasalnya, wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Terlebih, wilayah perbatasan juga diposisikan sebagai pintu gerbang negara.

Saat ini kawasan perbatasan memang telah banyak mendapat perhatian pemerintah, namun sejatinya masih memerlukan perhatian yang lebih optimal. Terutama, untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi warga negara di wilayah perbatasan. Terlebih, pada wilayah perbatasan pertumbuhan ekonomi masih relatif lambat.

Hal tersebut ditandai dengan aksesibilitas minim terhadap berbagai kebutuhan dasar. Begitu pula dengan berbagai sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.

Dalam penanggulangan keterbatasan berbagai sarana dan prasarana, khususnya yang mendukung kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan sudah menjadi komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR kini terus melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu dilaksanakan guna memperkuat wilayah perbatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Nawacita dan Visi Misi Presiden.

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada tahun 2018 akan melakukan penyusunan *masterplan* dan *development plan* (MPDP)

pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara, yakni Kawasan Skouw, Kota Jayapura di Provinsi Papua, Kawasan Motamasin, Kabupaten Malaka dan Kawasan Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 7 MPDP kawasan perbatasan negara yang dicanangkan pemerintah.

Ketujuh MPDP kawasan perbatasan tersebut, Entikong di Kabupaten Sanggau, Motaain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara,

Skouw di Kota Jayapura, Aruk di Kabupaten Sambas dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, arah kebijakan pemerintah untuk kawasan perbatasan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.

“Saat ini perbatasan negara telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi di sekitar kawasan PLBN, diperlukan juga berbagai inovasi lainnya,” terang Agusta

“Saat ini perbatasan negara telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi di sekitar kawasan PLBN, diperlukan juga berbagai inovasi lainnya,” terang Agusta beberapa waktu lalu di Jakarta.

Infrastruktur PLBN yang telah terbangun, antara lain Bangunan Utama, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Kedatangan,



Agusta Ersada Sinulingga paparkan rencana penyusunan MPDP kawasan ekonomi Skouw

Sumber: Dok BPIW

Laporan Khusus

Bangunan Klinik, Bangunan carwash, Bangunan Jembatan Timbang, Bangunan Pemindai Truk, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Keberangkatan, Bangunan Gudang Sita, Kennel, Bangunan Utilitas, Bangunan Check Point dan lainnya.

Guna menunjang inovasi pemerintah dalam pengembangan ekonomi di sekitar PLBN, diperlukan MPDP pengembangan ekonomi yang melibatkan setiap kementerian/ lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Pemkot Jayapura, kepolisian dan TNI.

"Terutama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengembangkan ekonomi di kawasan itu," terangnya.

Menurutnya, proses penyusunan MPDP pengembangan ekonomi akan melibatkan seluruh sektor. "Termasuk untuk memuat kejelasan siapa akan berbuat apa," terangnya.

Agus menjelaskan, tahapan penyusunan MPDP akan melalui *Kick Off Meeting* yang bertujuan untuk sosialisasi awal kegiatan dan

penyepakatan deliniasi kawasan. Adapun peserta yang ikut meliputi pejabat atau perwakilan Eselon 1 dan 2 Kementerian inti serta Kepala Bappeda di lokasi Perbatasan.

Kemudian berikutnya akan dilakukan rapat koordinasi (Rakor) awal dengan tujuan menggali potensi

Guna menunjang inovasi pemerintah dalam pengembangan ekonomi di sekitar PLBN, diperlukan MPDP pengembangan ekonomi yang melibatkan setiap kementerian/ lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

dan permasalahan kawasan serta identifikasi awal desa produksi, pengolahan, dan pemasaran. "Pesertanya Bappeda, Camat dan Dinas terkait di lokasi Perbatasan," terangnya.

Ada juga tahapan survey. Untuk Survey 1 dilakukan bertujuan untuk pengumpulan data awal terkait profil kawasan, potensi, permasalahan, isu strategis, dan usulan program. Survey yang dilakukan menggunakan metode kuesioner dan kunjungan lapangan.

Tahapan berikutnya melakukan analisis terhadap kawasan perbatasan mengenai konstelasi kawasan, lingkungan fisik, potensi ekonomi, isu strategis, sistem agribisnis, proyeksi pertumbuhan penduduk, kebutuhan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan lainnya

Usai analisis akan dilakukan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) Pusat. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi draft masterplan dan mendapat masukan penyempurnaan dari seluruh sektor terkait.

Kemudian dilakukan Survey 2. Hal tersebut dilakukan untuk memperdalam materi program-program prioritas. "Kemudian dilakukan penyusunan rencana dan program infrastruktur PUPR, infrastruktur non PUPR, sarana kesehatan, permodalan, agribisnis, suplai energi, kelembagaan, pendidikan kejuruan dan lainnya," papar Agusta.

Tahap berikutnya, lanjut Agusta, dilakukan FGD Daerah yang bertujuan sebagai sosialisasi dan menjangkau masukan daerah, seperti dari perwakilan pemerintah kabupaten, camat, kades, dan instansi pusat.

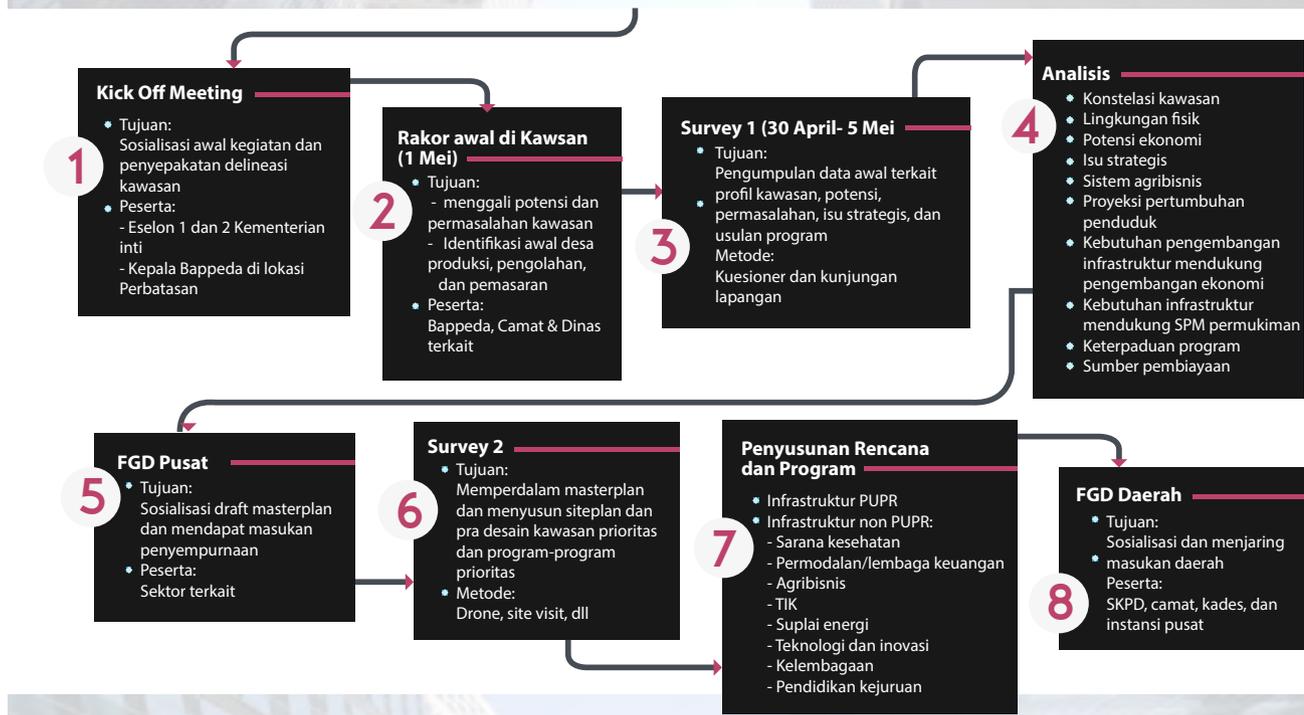
"Tahap akhir adalah seminar akhir,



PLBN Skouw kota Jayapura

Sumber: Kemen PUPR

Alur Penyusunan MPDP Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan



hal ini dilaksanakan bertujuan untuk mengikat komitmen penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Strategis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kartika Listriana mengatakan, Nawacita pemerintah mengamanahkan kawasan perbatasan negara harus diperhatikan dan dibangun, sehingga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa.

Pemerintah, lanjutnya, diamanatkan agar tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN, tetapi perlu melakukan pembangunan zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas.

"Zona pendukung dapat dikembangkan menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung lainnya," terangnya.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, lanjutnya, kawasan

di sekitar PLBN perlu dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di tempat sama, Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Vina Tambu mengatakan, dalam penyusunan *masterplan*

Adanya penyusunan *masterplan* dan DED yang disusun pemerintah pusat akan lebih memudahkan daerah dalam berpartisipasi pengembangan ekonomi sekitar.

pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara Skouw agar dapat dilengkapi dengan *Detail Engineering Design* (DED), agar pelaksanaan implementasi program lebih cepat terlaksana dan lebih cepat menggerakkan perekonomian setempat.

Menurutnya, adanya penyusunan

masterplan dan DED yang disusun pusat akan lebih memudahkan daerah dalam berpartisipasi pengembangan ekonomi sekitar. "Tentu pemerintah daerah akan berperan sesuai dengan kewenangannya," terangnya.

la menceritakan, saat ini komoditas unggulan di Kawasan Perbatasan Skouw antara lain, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. "Untuk ternak yakni, sapi, kerbau, kambing, babi, ayam ras, ayam buras serta itik/entok," terangnya. (ris/infoBPIW)

Kebijakan Program Kerakyatan Kementerian PUPR

Mekanisme Kontribusi dan Manfaat Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Luhur Selo Baskoro

Analisis Perencanaan Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat Pusat Perencanaan Infrastruktur, BPIW Kementerian PUPR

Peran pemerintah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sangat vital, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam menjalankan perannya, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan guna mengintervensi kondisi ekonomi dalam negeri misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter adalah campur tangan pemerintah dalam mengendalikan variabel moneter seperti uang beredar,

kegiatan perbankan, dan suku bunga untuk mencapai sasaran ekonomi yang diinginkan, misalnya stabilitas harga. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluarannya untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi secara umum.

Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun investasi pemerintah, dapat mempengaruhi

**tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi*



Daerah irigasi Komering Sumsel

Sumber: PUPR

variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengendalikan pengeluarannya.

Satu unsur permintaan agregat, dan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur adalah suatu bentuk pengeluaran pemerintah.

Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran memiliki formula $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat.

Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

(Todaro & Smith, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan *output* dan pendapatan

dalam suatu lingkup ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas suatu perekonomian, antara lain dengan cara peningkatan akumulasi modal misalnya melalui pembangunan infrastruktur, penambahan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi.

Berbagai diskusi telah dilakukan untuk mempelajari pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan pemahaman yang berbeda, namun sebagian besar sepakat bahwa infrastruktur memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berbagai diskusi telah dilakukan untuk mempelajari pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Namun sebagian besar sepakat bahwa infrastruktur memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat

yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi itu sendiri dapat dikategorikan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

Model pertumbuhan ekonomi Todaro dan Smith

$Y = AK\alpha L(1-\alpha)$

Y : Produk Domestik Bruto

K : Stok Modal Fisik dan Modal Manusia

L : Tenaga Kerja

A : Tingkat Kemajuan Teknologi

α : Elastisitas Output terhadap Modal

Opini

Secara langsung, infrastruktur memberikan manfaat terhadap kegiatan ekonomi melalui ketersediaan fasilitas produksi dan distribusi dari infrastruktur itu sendiri. Jalan, sebagai contoh, menjadi faktor pendukung utama pergerakan tenaga kerja dari domisilinya menuju pusat-pusat kegiatan produksi, fasilitas pendukung distribusi produk dari pabrik menuju pasar dan pelabuhan maupun *outlet* lainnya, dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baik di titik tolak dan tujuan akhir maupun di sekitar jalan tersebut.

Infrastruktur listrik menjadi variabel yang signifikan mengingat dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, kebutuhan listrik sudah tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan keseharian manusia. Energi listrik dalam proses produksi telah menjadi faktor yang penting, hingga menjadikan listrik sebagai salah satu biaya produksi yang cukup diperhitungkan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa kenaikan tarif dasar listrik menjadi sangat menentukan terhadap harga produk yang dipasarkan.

Infrastruktur air minum merupakan variabel yang mungkin kurang signifikan untuk sektor produksi mengingat fasilitas ini lebih banyak dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga. Namun begitu, infrastruktur jenis ini merupakan kebutuhan dasar suatu wilayah permukiman untuk berkembang. Data Badan

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 kelompok non niaga (rumah tangga, instansi pemerintah) merupakan pelanggan air bersih terbesar. jumlahnya mengalami mencapai 9,75 juta pelanggan atau 90,61 persen dari seluruh pelanggan air bersih. Sedangkan untuk kelompok industri dan niaga hanya sebesar 776,3 ribu (BPS, 2017).

Namun begitu, dampak positif infrastruktur terhadap ekonomi memiliki *time lag* (jeda waktu). Sebagai contoh pembangunan infrastruktur jalan dibangun Januari 2015 dan selesai pada akhir tahun, awal tahun 2016 baru bisa dinikmati dan bermanfaat. Terlebih lagi bila wilayah itu baru berangsur-angsur tumbuh karena adanya jalan tersebut, jeda waktu yang diperlukan sebelum jalan tersebut memberikan manfaat yang optimal dapat berselang selama beberapa tahun. Lama jeda waktu tersebut dapat berbeda

sebagaimana perbedaan karakteristik suatu wilayah.

Infrastruktur juga memberikan dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya dampak dari kegiatan investasi infrastruktur pemerintah terhadap jumlah tenaga kerja dan perkembangan kegiatan ekonomi wilayah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, permintaan tenaga kerja di sektor infrastruktur di wilayah tersebut meningkat.

Secara langsung, infrastruktur memberikan manfaat terhadap kegiatan ekonomi melalui ketersediaan fasilitas produksi dan distribusi dari infrastruktur itu sendiri. Jalan, sebagai contoh, menjadi faktor pendukung utama pergerakan tenaga kerja dari domisilinya menuju pusat-pusat kegiatan produksi.

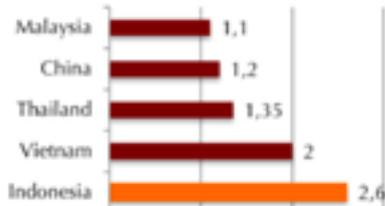


Pembangunan jalan dengan teknologi aspal plastik di Maros.

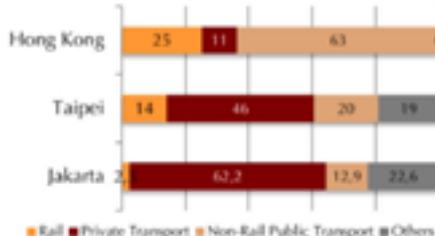
Sumber: PUPR

Perkiraan Manfaat Jangka Panjang dari Investasi Infrastruktur Pemerintah (saat ini dan yang akan datang) terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

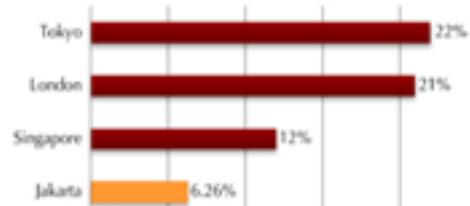
Lama perjalanan



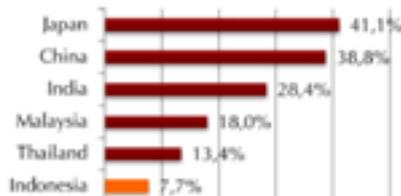
Penggunaan moda transportasi



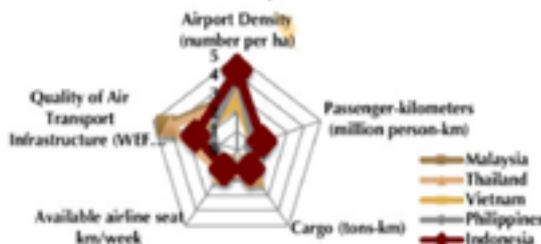
Rasio Jalan



Rasio Double Track (%)



Indikator transportasi udara



Dwelling time (hari)



Sumberr: Tusk Advisory, 2018

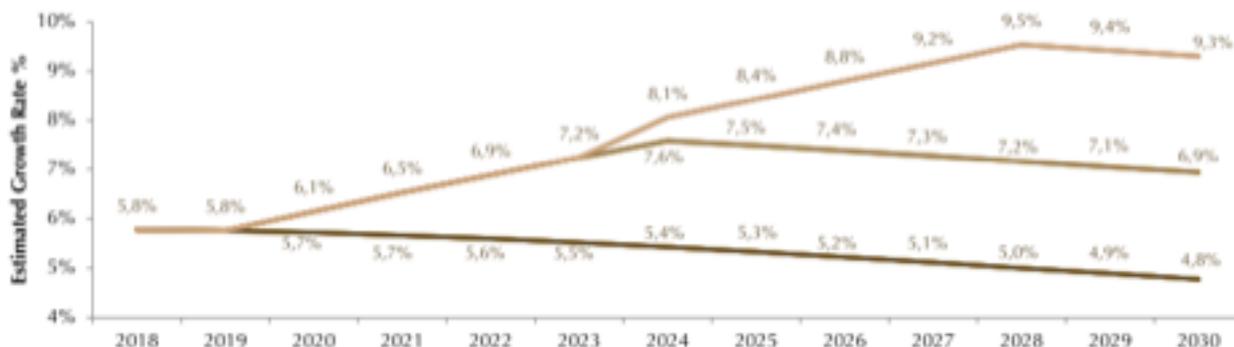
Kebutuhan tenaga kerja tersebut dipenuhi dengan menyerap pekerja dari wilayah tersebut sehingga kegiatan investasi ini dapat menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah setempat. Efek lain dari pembangunan ini adalah munculnya geliat sektor informal di sekitar wilayah pembangunan, misalnya warung makan, pasar, toko kelontong dan sektor lain yang mengikuti kebutuhan para pekerja baru ini.

Investasi pemerintah terhadap suatu kawasan juga mengisyaratkan perhatian pemerintah terhadap kawasan tersebut. Upaya pemerintah untuk membangun di suatu wilayah akan menarik minat dan meningkatkan percaya diri investor untuk mengalokasikan dananya di wilayah tersebut dengan keyakinan bahwa kegiatan investasi mereka akan didukung oleh pemerintah antara lain dengan cara penyediaan fasilitas pendukung. Selain itu, biaya produksi diyakini akan menurun dengan adanya fasilitas pendukung yang baik seperti jalan dan penyediaan air. Oleh karena

itu, adanya aktivitas pembangunan infrastruktur pemerintah di suatu wilayah akan meningkatkan kehadiran investasi asing diyakini akan memberikan *spillover effect* yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Husein (2006) dalam studinya mencoba menjelaskan keterkaitan antara kemiskinan dan infrastruktur. Kajian ini dengan menggunakan *logit regression method* mengandalkan data dari beberapa daerah irigasi tadah hujan yang saling berdekatan di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kajian ini juga menjadi bagian dari program strategi pengentasan kemiskinan di area irigasi pertanian di Asia yang dipimpin oleh *International Water Management Institute (IWMI)*.

Hasil dari studi ini menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas sistem irigasi membawa dampak positif bagi pengurangan kemiskinan petani. Variabel seperti produktivitas pertanian, luas lahan dan lokasi (terkait curah hujan dan aliran air) menjadi faktor penentu kesejahteraan petani. Penyediaan



sistem irigasi menentukan besarnya produktivitas pertanian dan lokasi lahan, dimana lahan yang lebih kering memerlukan penyediaan sistem irigasi yang lebih baik. Penghasilan petani yang didukung irigasi yang lebih baik lebih tinggi secara signifikan dibanding mereka yang mengalami kendala irigasi.

Pada skala nasional, BPIW (2017) mempelajari pengaruh pembangunan infrastruktur PUPR terhadap beberapa variabel ekonomi nasional sebagai bagian dari studi skema pembiayaan infrastruktur PUPR. Kajian ini menggunakan data di level provinsi yang tercakup dalam 8 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) berbeda.

Studi ini menemukan bahwa panjang jalan nasional berpengaruh signifikan terhadap GDP nasional dengan koefisien 3,443, di mana penambahan 1 persen panjang jalan akan meningkatkan hampir 3,5 persen GDP nasional. Infrastruktur air minum juga berpengaruh signifikan terhadap GDP, dimana peningkatan 1 persen unit air minum akan meningkatkan GDP sebesar 2,7 persen dengan asumsi variable lain tetap.

Kajian ini memberi gambaran bahwa infrastruktur yang sudah dibangun memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan kesimpulan dua kajian sebelumnya, ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pendapatan pekerja sektor non-pertanian di pedesaan (Gibson & Olivia, 2009).

Dua faktor utama dalam kajian ini, kualitas jalan dan ketersediaan listrik, mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan pendapatan perusahaan diluar sektor pertanian. Peningkatan kualitas kedua infrastruktur tersebut akan meningkatkan dampak positif terhadap dua variabel ekonomi tersebut.

Dua faktor utama dalam kajian ini, kualitas jalan dan ketersediaan listrik, mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan pendapatan perusahaan diluar sektor pertanian. Peningkatan kualitas kedua infrastruktur tersebut akan meningkatkan dampak positif terhadap dua variabel ekonomi tersebut. Kebijakan pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang dimulai tahun 2014 dengan fokusnya terhadap pembangunan infrastruktur menjadi sorotan belakangan ini. Dalam rentang waktu 2015-2017 alokasi pendanaan infrastruktur mencapai

Rp. 990 triliun (Kompas, 2017). Alokasi dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, diantaranya 300 kilometer jalan tol, 2.623 kilometer jalan nasional mulai dari Trans Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. pembenahan bandara, pembangunan waduk dan juga infrastruktur kereta api. Beberapa pihak mencoba mempelajari manfaat dari

kebijakan pemerintah terkait penyediaan infrastruktur ini, diantaranya Tusk Advisory Pte. Ltd.

Kajian Tusk Advisory berdasarkan data dua tahun kebelakang menyatakan bahwa Indonesia tertinggal dalam penyediaan infrastruktur secara keseluruhan. Variabel lama perjalanan untuk 100 km di Indonesia adalah yang terburuk dengan kebutuhan waktu 2,6 jam, jauh berbeda dengan Malaysia di peringkat satu dengan waktu 1,1 jam.

Hal ini disebabkan oleh kualitas jalan dan dukungan jalan



Jembatan Haltekam di Papua

Sumber: PUPR



PLBN Motaain Pos Perbatasan Timor Leste

Sumber: PUPR

bebas hambatan yang masih rendah. Penggunaan moda transportasi pribadi juga yang tertinggi di Indonesia. Atas dasar ini, penyediaan infrastruktur menjadi fokus dalam RPJMN 2015-2019.

Kajian yang sama menggunakan metode kuantitatif (regresi) dan memperkirakan peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen dengan asumsi proyek konstruksi sebesar \$100 miliar selesai sesuai jadwal.

Dampak jangka panjang diperkirakan akan melejitkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada tahun 2019 dan mencapai 9,2 persen di tahun 2030.

Disamping itu, indeks Gini diperkirakan akan turun di tahun 2030, yang artinya ketimpangan ekonomi di Indonesia berkurang dan pemerataan ekonomi membaik. Studi ini juga memperkirakan bahwa angka kemiskinan akan turun sebesar 8% ditahun yang sama.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pembangunan infrastruktur saat ini diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang positif di berbagai sektor. Hasil studi tersebut sejalan dengan teori Keynes, Todaro dan Smith, serta kajian-kajian lain yang lebih modern.

Untuk menghitung berapa nilai manfaat *persisnya* dari pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan kelengkapan data yang akurat serta kebutuhan waktu dan tenaga yang tepat yang membatasi lingkup tulisan singkat ini.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan gambaran singkat mengenai manfaat pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian, Lebih lanjut, diharapkan tulisan

singkat ini memberikan ide pengembangan analisis manfaat infrastruktur yang lebih tajam.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur saat ini diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang positif di berbagai sektor. Hasil studi tersebut sejalan dengan teori Keynes, Todaro dan Smith, serta kajian-kajian lain yang lebih modern.

10+2 Kawasan Strategis

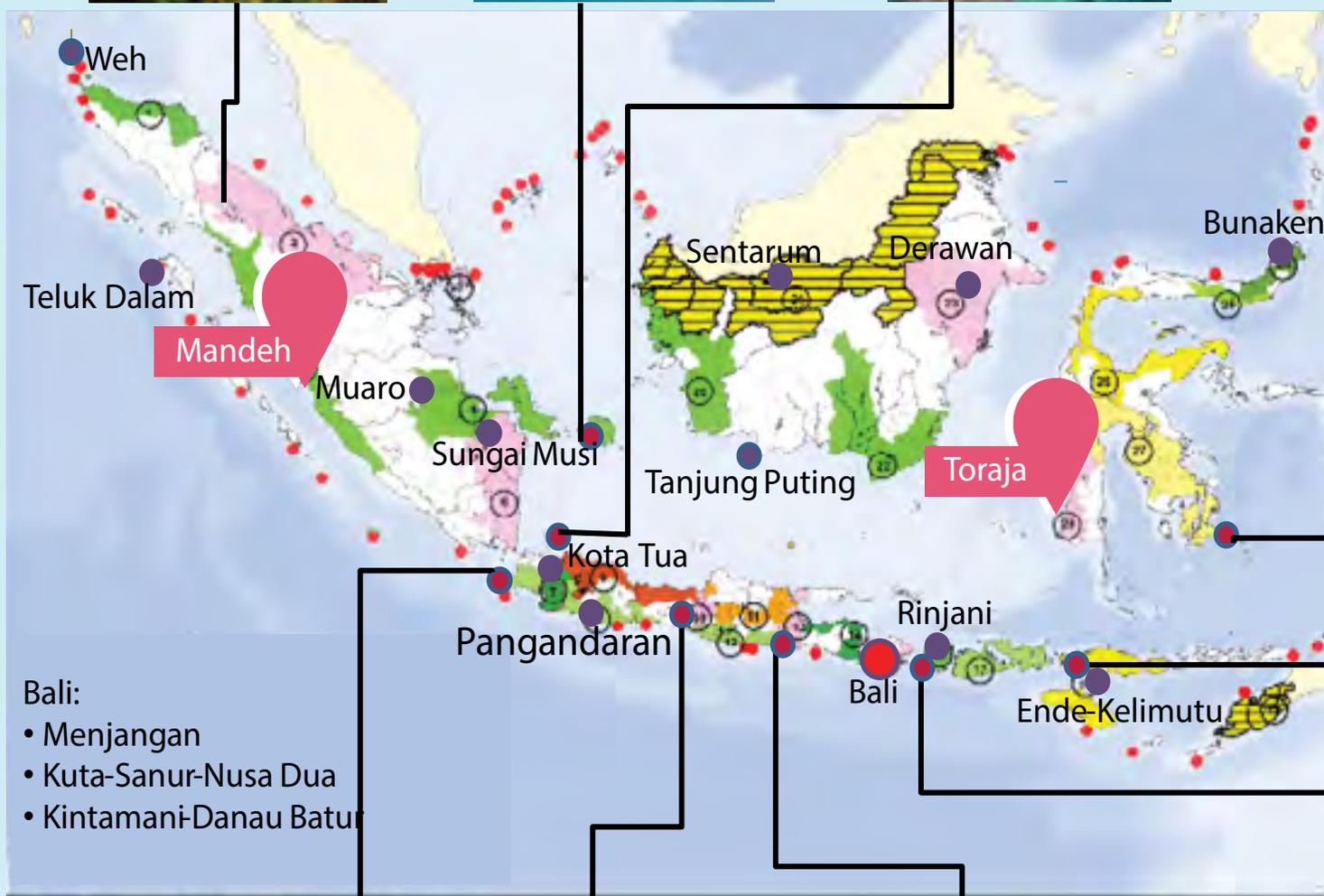
01 Danau Toba



02 Tanjung Kelayang



03 Kepulauan Seribu



06 Tanjung Lesung



07 Borobudur



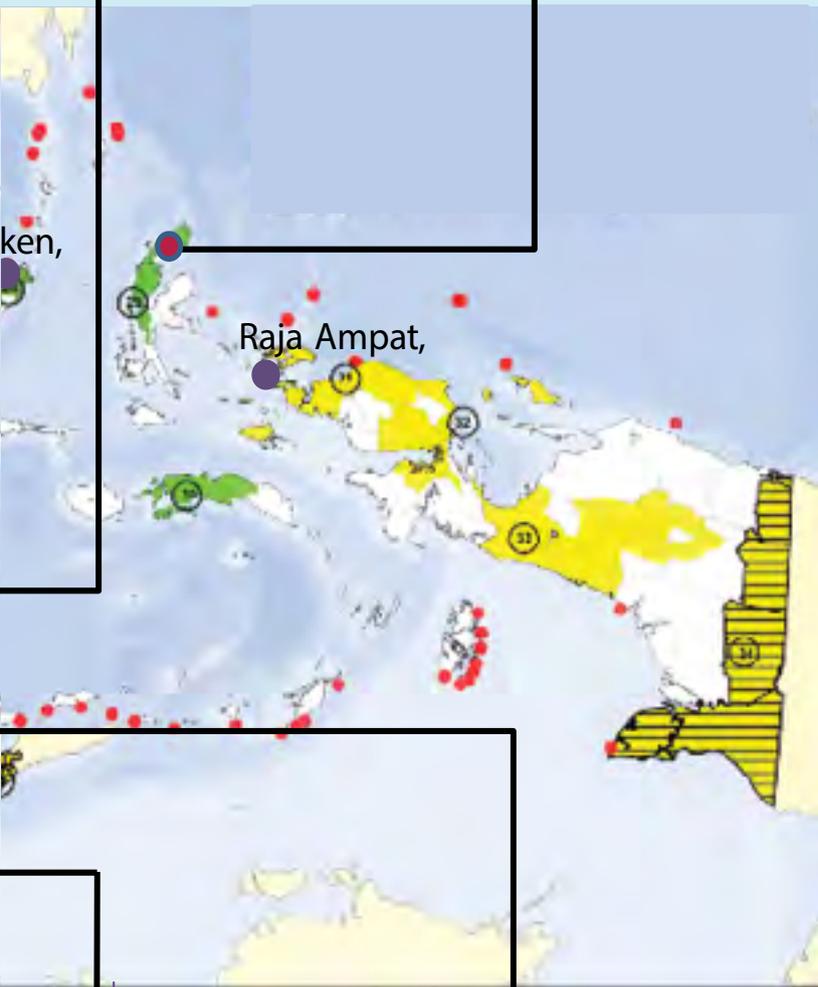
08 Bromo-Tengger-Semeru

Pariwisata Nasional Prioritas

04 Wakatobi



05 Morotai



Pemerintah memprioritaskan pembangunan pariwisata melalui KSPN. Terdapat 10+2 KSPN, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, dan +2 nya adalah Mandeh dan Toraja. Ada 3 kawasan yang mendapat bantuan dari World Bank, yaitu Danau Toba, Borobudur dan Lombok. Saat ini BPIW dipercaya untuk menyusun *Integrated Tourism Masterplan*.

09 Mandalika



10 Labuan Bajo



Parepare, Kota Bandar Madani Yang Wajib Dikunjungi

Kota Parepare yang dikenal dengan kota Singgah, kota bandar madani dan kota pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama untuk pelayaran tujuan Kalimantan. Jika datang dari arah selatan atau dari Makassar, pengendara akan disambut oleh sebuah gapura dengan tulisan "Di Kota ini Lahir Pemimpin Bangsa Presiden III, Prof. Dr. ING. Bacharuddin Jusuf Habibie". Waktu tempuh kendaraan dari Makassar ke Parepare sekitar 2,5 hingga 3 jam, atau setara waktu tempuh antara Jakarta-Bandung.

Setelah itu, anda akan langsung menemukan jembatan layang sepanjang 125 meter yang berfungsi sebagai akses utama ke Kota Parepare. Menelan anggaran Kementerian PUPR sekitar 42 miliar di tahun anggaran 2015 dan 2016 untuk pembangunan jembatan. Kawasan di sekitar jembatan ini menjadi salah satu destinasi pariwisata oleh pemerintah daerah yaitu *Tongrangeng River Side*. Destinasi baru ini mampu menarik perhatian pengunjung dan menjadi *new icon* di wilayah Sulawesi Selatan.

Berbagai macam inovasi terus digiatkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Dengan jumlah penduduk ± 140.000 jiwa, kota Parepare kini telah berhasil berkembang dengan sangat pesat dalam berbagai bidang terutama dalam dunia kepariwisataan. Adapun Parepare

Tongrangeng River Side ini merupakan ruang hijau yang dibangun untuk menunjukkan kota Parepare yang cantik dan sejuk sehingga siapapun yang datang untuk berkunjung, akan merasa nyaman untuk menghabiskan waktunya di tempat ini

memiliki arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna "Kain Penghias" yg digunakan di acara-acara seperti pernikahan.

Tongrangeng River Side

Tongrangeng River Side ini merupakan ruang hijau yang dibangun untuk menunjukkan kota Parepare yang cantik dan sejuk sehingga siapapun

yang datang untuk berkunjung, akan merasa nyaman untuk menghabiskan waktunya di tempat ini. Di sini juga terdapat wisata bahari yang akan mengantar masyarakat atau pengunjung yang datang melihat keindahan Salo Karajae dengan menggunakan perahu yang disediakan. Pemandangan yang begitu indah sekitar Salo Karajae ini terutama saat *sunset* akan mendukung tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang akan banyak diminati oleh para wisatawan. Terutama untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, tempat ini dapat menjadi pilihan yang sangat tepat.

Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun

Mengarah ke pusat kota, pengunjung akan mendapati monument yang terbuat dari perunggu yaitu monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun. Monumen sengaja dibuat di daerah Parepare karena kota tersebut merupakan kota kelahiran bapak BJ Habibie. Dilansir dari tribunnews.com, monumen ini



Kapal bersandar di Parepe

Sumber: Istimewa

diresmikan pada bulan Mei 2015 yang lalu. Saat itu, bapak Habibie pulang kampung ke Parepare dan meresmikan langsung monumen yang dinamakan Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun. Selain patung BJ Habibie-Ainun tersebut, ada foto-foto Habibie dan Ainun yang dipajang di bagian dalam monumen. Mayoritas foto yang dipasang tersirat kebahagiaan mereka. Cinta sejati keduanya pun terasa nyata saat kamu berada di monumen ini dan memberikan inspirasi bagi para pasangan yang berkunjung ke sana.

Parepare memiliki semua keunggulan untuk menjadi kota wisata. Pantai panjang yang tertata rapi dengan view sunset yang menawan, bagian kota atas (wilayah kota di atas gunung yang menawarkan pemandangan memukau di siang apalagi di malam hari), kota bawah (kota lama), pelabuhan dengan segala pernak-perniknya. Dan tentu saja pemandangan pantai panjang, yang memperlihatkan lekukan tanjung Ujung Lero.

Namun, hingga saat ini belum ada alasan yang cukup menggoda yang membuat pengunjung dari Makassar

rela pergi hanya untuk mengunjungi pare-pare. Untuk mendongkrang pamor pare-pare, mungkin tidak hanya dibutuhkan potensi tetapi juga inovasi yang menarik dari pemerintah daerah dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk menarik perhatian pengunjung.

Membangun “Museum Habibie” yang didesain secara profesional bagi yang ingin mengetahui tentang BJ Habibie mungkin dapat menjadi terobosan sederhana untuk Pemerintah Kota Pare-pare.

Pantai Lumpue

Pantai Lumpue merupakan salah satu tempat liburan favorit di Parepare. Pantai Lumpue merupakan tempat wisata tertua di kota Parepare, dimana lokasinya berjarak sekitar 150 kilometer dari kota Makassar. Pantai ini memiliki keindahan panorama alam yang sangat indah yang dihiasi oleh pasir halus dan air laut yang sangat jernih, terdapat pegunungan karang dengan goa-goa kecil yang berderet indah. Pantai Lumpue sudah dikenal sejak tahun 50an di Sulawesi Selatan, pada masa itu lumpue dijadikan tempat

bersandarnya perahu – perahu nelayan usai mencari ikan di laut lepas. Konon Lumpue disebut sebagai Pantai Kupu-Kupu, karena pada saat menjelang sore, perahu sudah banyak berkumpul, dan jika dilihat dari kejauhan mirip seperti kumpulan kupu-kupu raksasa. Pantai ini sangat cocok digunakan untuk tempat liburan di akhir pekan, tidak heran jika pantai ini menjadi pilihan utama wisatawan domestik khususnya penduduk lokal. **(Marina)**



Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun

Sumber: Istimewa

5 Kota yang Masuk *Creative Cities Network* UNESCO

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2015, merilis 47 anggota anyar Jaringan Kota Kreatif (*Creative Cities Network*).

Jaringan tersebut mewadahi kota-kota di dunia yang berkomitmen mengembangkan diri dengan menyertakan salah satu dari tujuh bidang kreatif yang digagas oleh organisasi PBB tersebut.

Bidang-bidangnya di antaranya, kerajinan dan kesenian rakyat, desain, film, gastronomi, literatur, media arts, dan musik.

Jaringan Kota Kreatif UNESCO bertujuan mendorong kerjasama internasional antar kota yang komitmen berinvestasi di kreativitas sebagai pendorong pembangunan kota berkelanjutan, inklusi sosial dan budaya. Kota yang masuk dalam *Creative City Network* untuk kategori kota selain Bandung adalah Singapura, Budapest, Kaunas di Lithuania, Detroit (AS) dan Puebla di Meksiko.

1. Bandung-Indonesia

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 KM sebelah tenggara Jakarta. Wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.

Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting. Antara lain, tempat berdirinya perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (TH Bandung), sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bandung juga menjadi lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan

Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.

Pada tahun 1990 kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time. Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana.

Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan *factory outlet* yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.



Halaman Masjid Raya Agung Jawa Barat di Kota Bandung

2. Singapura-Singapura

Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut Pulau Singapura tetapi secara resmi disebut Pulau Ujong (Melayu: berarti pulau di ujung daratan (semenanjung)). Terdapat dua jembatan buatan menuju Johor, Malaysia: Johor-Singapore Causeway di utara, dan Tuas Second Link di barat. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin dan Pulau Sentosa adalah yang terbesar dari beberapa pulau kecil di Singapura. Titik alami tertinggi adalah Bukit Timah Hill dengan tinggi 166 M.

Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Hasilnya, daratan Singapura meluas dari 581,5 KM2. pada 1960-an menjadi 704 KM2. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna, contohnya Pulau Jurong.



Patung Merlion di Kota Singapura

3. Budapest-Hungaria

Budapest merupakan kota pertama di Eropa Tengah yang meraih penghargaan kota kreatif dari UNESCO PBB. Kota ini merupakan penggabungan yang dilakukan pada tahun 1873 terhadap dua kota bersebelahan, Obuda (sisi barat) dan Pest (sisi timur), namun terpisah oleh Sungai Donau. Kota ini memiliki dua bagian utama, Buda dan Pest. Bagian-bagian ini berada di tepi seberang sungai. Beberapa jembatan menghubungkan keduanya. Buda memiliki banyak bukit, sedangkan Pest lebih datar.

Lebih dari 100 sumber air panas alam ditemukan di Budapest. Banyak spa atau resort dibangun di sekitar mata air tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa Budapest menjadi destinasi wisata utama.

Budapest juga menjadi pusat transportasi, manufaktur, dan perbankan Hongaria. Pabrik-pabrik di kota ini memproduksi peralatan elektronik, komunikasi, bahan kimia, kain, dan makanan olahan. Pabrik-pabrik lainnya membuat bus, peralatan kereta api, dan kapal.



Jembatan Szechenyi Chain di Budapest

4. Puebla-Meksiko

Puebla secara resmi Heroica Puebla de Zaragoza dan dikenal sebagai Puebla de los Angeles merupakan pusat Kota Puebla. Kota terbesar di negara bagian Puebla yang paling penting di Meksiko. Kota era kolonial yang direncanakan, terletak di selatan Meksiko Tengah di jalur utama antara ibu kota, Mexico City.

Kota ini didirikan pada 1531, dua pemukiman pribumi utama pada saat itu, Tlaxcala dan Cholula Kota ini juga terkenal dengan mol poblano yang sebagian besar ekonominya didasarkan pada industri.

Tanam Puebla di Kota Puebla, Meksiko'



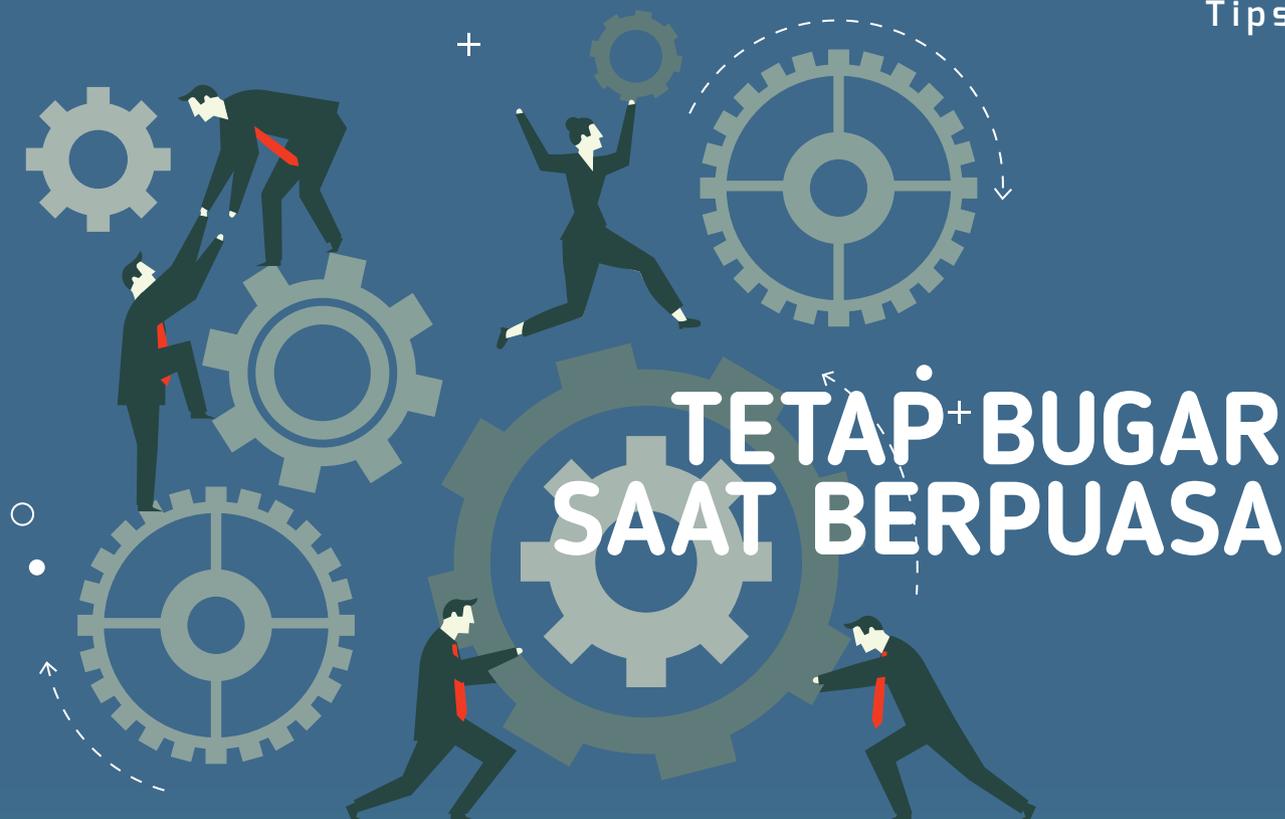
5. Detroit-Amerika Serikat

Detroit adalah sebuah kota di negara bagian Amerika Serikat Michigan. Berlokasi di Sungai Detroit, berhadapan dengan Windsor, Ontario, kota Detroit tumbuh dari sebuah pos dagang kecil menjadi sebuah kota industri modern berpenduduk 1 juta jiwa yang-sejak awal abad 20-telah mengerti bahwa keberuntungannya tergantung pada naik-turunnya industri mobil AS.

Secara budaya, Detroit tetaplah sebuah kota kaya, malah selama kerusuha sipil di akhir abad 20. Bersama Orkes Simfoni Detroit, Institut Seni Detroit, Akademi Seni Cranbrook dan Museum Henry Ford, kota ini menjadi rumahí MoTown (Motor Town = Kota Motor) Records, di mana musikus seperti the Supremes memproduksi rekaman dan menghadirkan revolusi dunia bagi dunia musik pop.(**)



Kawasan perkotaan Detroit, Amerika Serikat



Seluruh dunia akan menjalankan Puasa selama sebulan penuh di Bulan Ramadhan 1439 H atau yang diperkirakan dimulai tanggal 15 Mei 2018. Sebagai kewajiban umat Islam yang dilaksanakan setiap tahunnya, puasa seharusnya bukan menjadi hambatan dalam beraktivitas karena pada hakikatnya sendiri, puasa bertujuan menyehatkan.

Namun, seringkali banyak orang yang merasa menjadi lebih lemas dan kurang bertenaga saat berpuasa sehingga berpengaruh pada aktivitas sehari-harinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah adanya perubahan waktu makan, konsumsi air mineral yang tidak bisa setiap waktu, dan adanya perubahan kuantitas waktu tidur. Hal-hal sederhana dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari adanya perbedaan kebiasaan yang terjadi selama berpuasa.

Berikut adalah tips untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap Bugar selama berpuasa.

1. Menjaga Pola Makan dan Kualitas Makanan yang dikonsumsi

Kebanyakan orang akan melampirkan rasa laparnya yang tertahan selama kurang lebih 14 jam selama berpuasa pada saat berbuka puasa dengan memakan makanan dalam jumlah yang berlebihan. Minuman dingin, makanan berat seperti nasi dengan lauk pauk, dan makanan ringan yang digoreng, disantap di satu waktu. Hal ini tidak baik untuk dilakukan karena dapat menyebabkan gangguan pada lambung. Selain itu, kebiasaan ini dapat membuat tubuh kita menjadi lebih gemuk walaupun saat siang hari kita berpuasa.

Awalilah santap buka puasa dengan mengonsumsi buah-buahan manis dan meminum air mineral atau teh hangat. Dua jenis panganan ini baik dijadikan pembuka saat berbuka puasa, karena selain dapat memulihkan tenaga juga dapat mengganti 'persediaan' cairan dalam tubuh.

Konsumsi makanan berat setelah ibadah sholat Maghrib. Hal ini bertujuan untuk memberikan energi saat ibadah sholat taraweh dan mencegah rasa lapar di malam hari. Selain setelah sholat Maghrib, mengonsumsi makanan berat juga sangat dianjurkan saat sahur karena saat sahur, cadangan energi untuk beraktivitas tersimpan.

2. Memiliki waktu tidur yang cukup

Umumnya waktu tidur yang dibutuhkan rata-rata setiap orang berkisar antara 6-8 jam. Namun, saat Bulan Ramadhan, biasanya waktu tidur berkurang. Adanya waktu sahur membuat seseorang harus bangun lebih awal sehingga waktu tidur berkurang menjadi 4-6 jam. Hal tersebut dapat diatasi dengan membiasakan tidur siang selama 15-20 menit saat waktu istirahat. Tidur siang dapat membuat tubuh segar dan mengembalikan energi pada tubuh.

3. Berolahraga Ringan

Banyak orang yang enggan untuk berolahraga saat berpuasa karena khawatir akan cepat lelah dan menjadi semakin lapar serta haus. Akan tetapi, pada dasarnya olahraga saat berpuasa justru memiliki banyak manfaat di antaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, dan memperlancar peredaran darah.

Berolahraga saat berpuasa tidak menjadi berat apabila dilakukan di waktu yang benar, yaitu saat sebelum berbuka puasa, setelah sholat tarawih, dan menjelang sahur. Intensitas olahraga yang dilakukan sendiri sebaiknya lebih ringan dari yang dilakukan saat tidak berpuasa. **(Syifa)**



Rumah Susun Cigugur Tengah Kota Cimahi yang menerapkan Sistem Pracetak C-Plus

Penerapan Struktur Pra Cetak Sistem C Plus

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang meningkat mencapai 3,4 persen (Data Badan Pusat Statistik), maka pembangunan rumah susun mutlak ada. Dengan harga lahan yang semakin tinggi diperlukan alternatif perumahan

Untuk mempercepat pembangunan rumah, diperlukan sistem pembangunan dengan struktur pra cetak atau refabrikasi

bertingkat. Untuk mempercepat pembangunan rumah tersebut diperlukan sistem pembangunan dengan struktur pra cetak atau refabrikasi yang merupakan rumah yang

kontruksi pembangunannya cepat, karena menggunakan modul hasil fabrikasi industri (pabrik).

Sehubungan dengan hal itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR telah mengembangkan teknologi yang disebut Sistem Pracetak C-Plus. Sistem tersebut merupakan sebuah sistem struktur pracetak untuk bangunan bertingkat dengan kolom berbentuk "Plus (+)". Sambungan kolom balok kolomnya menggunakan kombinasi sambungan mekanis berupa pelat baja dengan mur dan baut serta *grouting* dengan semen non-*shrinkage* (non-penyusutan).



Gambar saat proses pembangunan Rumah Susun Cigugur yang menggunakan Sistem Pracetak C-Plus.

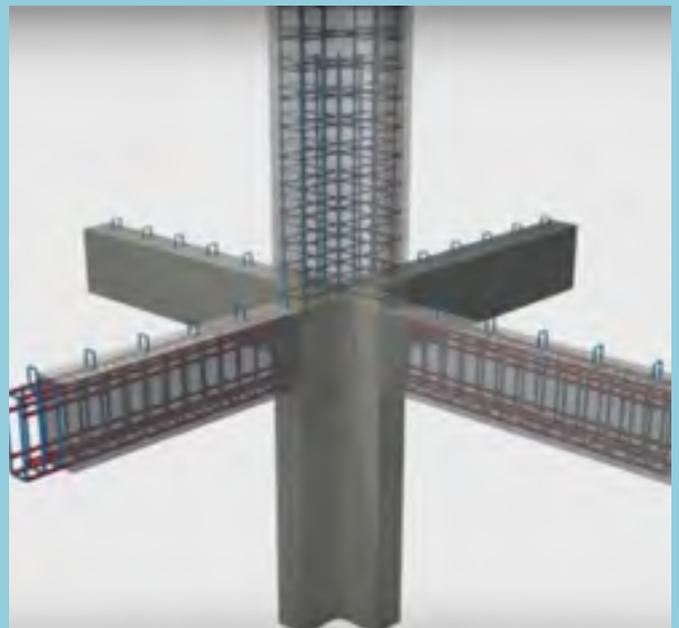
Keunggulan dari teknologi ini adalah efisiensi biaya hingga 20 persen mutu lebih terjamin, waktu pengerjaan lebih singkat, dan bentuk simetris, sehingga kapasitas kolom sama pada kedua arah. Selain itu ruang lebih optimalisasi.

Sistem Pracetak C-Plus ini untuk mendukung program pemerintah yakni pembangunan seribu *tower* rumah susun sederhana, rusunami atau rusunawa. Dengan sistem yang bersifat refabrikasi ini tidak lagi memerlukan waktu banyak untuk menunggu beton kering. Sistem ini tidak menghilangkan fungsi keamanan dan kenyamanan bangunan bagi penghuninya. Dengan pra cetak ini usaha pembangunan meningkat 13 ribu pada tahun 2008.

Diberi nama "C" karena menggunakan kolom beton pada bangunan sebagai tulangan yang telah dipabrikasi. Sedangkan "plus" yang ditambahkan pada "C" ditujukan pada kolom yang berbentuk "tanda tambah" atau "plus" untuk efisiensi ruangan sehingga dinding rata dengan kolom. Dengan cara ini maka tidak ada penonjolan bagian kolom pada sudut ruangan.

Sistem Pracetak C-Plus ini telah diuji coba pada penyediaan rumah susun di Rumah Susun Cigugur Cimahi Jawa Barat pada 2006 lalu. Bangunan ini memiliki dua blok setinggi lima lantai, di mana empat lantai merupakan unit perumahan. Sedangkan bagian dasar rumah susun merupakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Kini sistem tersebut dapat diaplikasikan di gedung bertingkat dan tahan gempa sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan hak cipta sistem ini telah diterbitkan Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada April 2006. (**Sumber : litbang.pu.go.id/Hen**)



Gambar hasil perakitan pada komponen sambungan balok dan kolom pada Sistem Pracetak C-Plus

Potret



BPIW Turut Meriahkan 100 Tahun ITB



Guna memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Institut Teknologi Bandung (ITB) ke 100 diselenggarakan pameran "The 1st ITB Centennial and 4th Planocosmo International Conference on Infrastructure Development".

Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpartisipasi menggelar pameran produk yang dilaksanakan tergabung dengan Biro Komunikasi Kementerian PUPR. BPIW memamerkan panel Pra Konsultasi Regional (Prakonreg) dan Masterplan Development Pulau-Pulau Kecil Terluar yang disajikan dalam bahasa Inggris.

Workshop Peningkatan Pemberitaan BPIW

Dalam rangka melakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi Badan Pengembangan Informasi Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi (HKLI BPIW) menggelar "Workshop Peningkatan Pemberitaan" dengan melakukan pelatihan fotografi dan penulisan.

Dalam pelatihan penulisan para peserta yang merupakan perwakilan dari tiap bidang di BPIW dibimbing oleh Harun Mahbub, wartawan senior sekaligus penulis buku "12 Jam Bisa Jadi Wartawan".

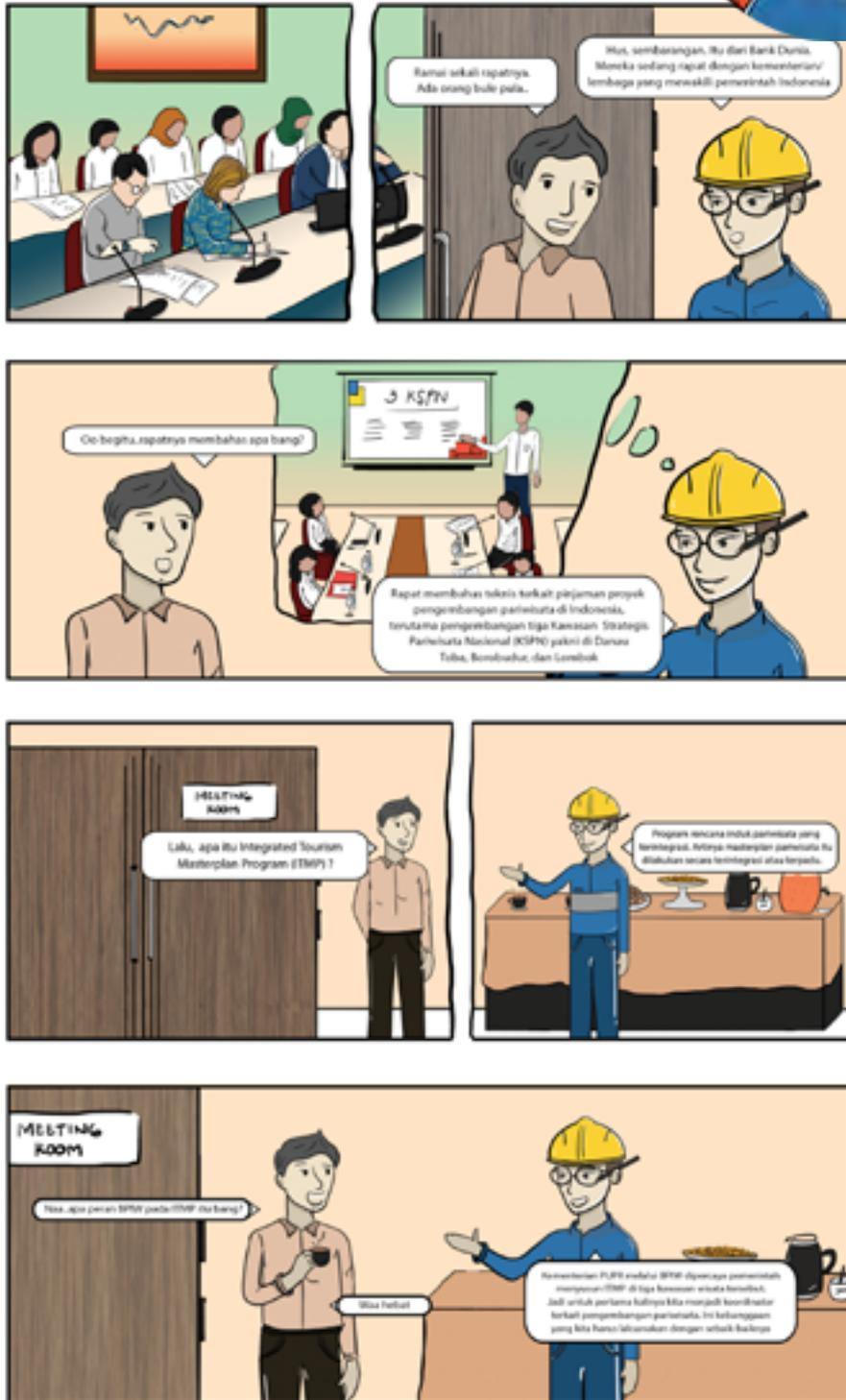
Adapun pelatihan fotografi dibimbing fotografer senior, Boy T Harjanto yang pelatihan praktisnya dilakukan di spot Candi Boko dan Candi Prambanan. Berikut delapan foto terbaik jepretan peserta, dimana juara I diraih oleh Juliana.



Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI





Pertanyaan

1. Sebutkan 3 kawasan pariwisata yang menjadi target *Integrated Tourism Masterplan* BPIW!
2. Apa kepanjangan dari KSPN?
3. Sebutkan 3 kawasan perbatasan yang MPDP-nya sedang disusun BPIW?

Ketentuan

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : humasbpiw@pu.go.id. Jawaban juga dapat disampaikan melalui *WhatsApp No: 0812-9897-4748* disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 29, Mei 2018.

Jawaban kuis edisi 27

1. Apa istilah dalam bahasa jepang yang menginspirasi hadirnya “Anjungan Cerdas” di Indonesia?
Jawaban : Michi No Eki
2. Sebutkan salah satu fungsi anjungan cerdas!
Jawaban : - Sebagai tempat istirahat/ rest area
 - Pusat informasi infrastruktur PUPR
 - Sarana pengembangan ekonomi lokal,
 - Sarana pengembangan wisata/budaya,
 - Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jalan nasional
3. Sebutkan 2 anjungan cerdas yang sudah dibangun Kementerian PUPR!
Jawaban : Anjungan Cerdas Rambut Siwi (Jembrana-Bali), dan Anjungan cerdas Tugu (Trenggalek-Jawa Timur)



1. Dody Arisandi
 Jl. Koperpu 8 no. 32 RT9/18 Aren Jaya Bekasi Timur
2. Haris Budiman
 Gedung G Kementerian PUPR Jl. Pattimura no. 20 Kebayoran Baru



Dr Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc

Tekad Berkontribusi Dalam Mewujudkan Perkotaan yang Ideal

Berkontribusi dalam memberikan pemikiran-pemikiran positif terhadap pembangunan perkotaan di Indonesia. Tekad itulah yang tertanam kuat dalam benak Dr Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc., DEA, salah satu ahli Pengembangan Wilayah dan Kota Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

Ya pria yang diamanahi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR ini mengakui, dalam rangka mewujudkan tekad tersebut dirinya mengkondisikan jajarannya agar senantiasa menggali informasi, memperkuat dasar-dasar keilmuan dan mencari pengetahuan baru terkait pembangunan kota di dunia.

Docteur (gelar Doktor dari Perancis) bidang *Geography and Planning* jebolan Universite Paris 10 Nanterre ini menerangkan, guna menyamakan pemahaman bersama itu ada sejumlah hal yang selalu ditekankan kepada tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan.

"Antara lain, hal mendasar yang selalu ditanamkan pada tim di bidang (Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan,-red) adalah pentingnya memiliki pengetahuan dasar terkait perencanaan kota, mengenali isu dan permasalahan spesifik kawasan metropolitan yang direncanakan, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan networking terutama dengan *stakeholders* terkait, dan keinginan untuk terus belajar, terang peraih predikat *Tres Honorable avec Felicitations du Jury* atau penghargaan tertinggi untuk lulusan S3 di Perancis (setara dengan *Summa Cum Laude*) ini kepada "Sinergi" di ruangan kerjanya, beberapa waktu lalu.

Arek Surabaya kelahiran 5 November 1971 ini juga menerangkan, kesamaan pemahaman tersebut penting untuk dibentuk. Pasalnya, BPIW sebagai lembaga baru menampung sumber daya manusia (SDM) dari berbagai latar belakang bidang keilmuan dan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

"Misalnya, ada pegawai yang eks Tata Ruang (Direktorat Jenderal Penataan Ruang,-red), saat di Ditjen Penataan Ruang dulu dalam menyusun *masterplan* atau rencana tata ruang, ruang lingkup yang dimiliki adalah mencakup perencanaan seluruh sektor termasuk sektor di luar Kementerian PU seperti perhubungan, perindustrian, dan lainnya. Namun kita (BPIW,-red) saat ini dalam menyusun *masterplan* itu fokus hanya pada infrastruktur ke-PUPR-an, walaupun rencana dari sektor-sektor lain harus diketahui dan dikaji kebutuhan dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR" jelas Sarjana Teknik Planologi jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Hal ini tidak mudah, lanjut Eko, diperlukan pemahaman akan peraturan perundangan terkait masing-masing unor lebih dalam daripada saat menangani penataan ruang. Pria yang dikenal dekat dengan bawahan ini mengatakan, BPIW senantiasa dituntut untuk dapat memberikan arahan terkait keterpaduan rencana dan sinkronisasi program bagi Unit Organisasi (Unor) lain dalam perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR. "Dengan begitu, tim dari BPIW ini dituntut memiliki pengetahuan yang setidaknya sama dengan pengetahuan pegawai unor lain, minimal dalam hal regulasi," ujar Eko yang juga meraih gelar DEA (S2) dari Paris ini.

Sebagai orang yang mendalami tidak hanya perencanaan kota, namun juga perencanaan wilayah di masa pendidikannya, Eko mengatakan bahwa secara teoritik hal yang dilakukan di BPIW tidak pernah dituliskan dalam literatur-literatur ilmiah terkait, yakni menurunkan konsep pengembangan wilayah hingga ke program infrastruktur. Hal ini membuat apa yang dilakukan oleh BPIW sangat menarik dan menantang, ungkap penulis bagian Pengembangan Wilayah di Indonesia Kontemporer pada buku *"Indonesie Contemporaire"* ini.

Untuk menyikapi dinamika perkotaan khususnya metropolitan yang sangat tinggi, pria peraih predikat *Tres Bien*, penghargaan

tertinggi untuk S2 di Perancis ini menyatakan bahwa tim bidang metropolitan mutlak harus mengikuti perkembangan dan memahami aspek pembiayaan infrastruktur, perkembangan teknologi-teknologi terbaru, kelembagaan, dan permasalahan lingkungan. Peralnya, perkembangan kota saat ini sangat pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga, namun daya dukung dan daya tampung suatu kota memiliki keterbatasan. Sehingga tim BPIW dituntut untuk mencari inovasi terapan teknologi untuk solusi dari keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota.



Dr Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc saat menerima Prix Mahar Schutzenberger 2009 di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Perancis

Sumber: Istimewa

Kerap Jadi Narasumber Seminar Internasional

Sebagai mahasiswa doktoral di Perancis mewajibkannya untuk mempresentasikan paper di konferensi internasional. Namun Eko mengatakan bahwa keterbatasan dana riset membuat dia harus selektif hanya berpartisipasi pada konferensi-konferensi yang panitiannya bersedia menanggung ongkos transportasi dan akomodasinya, antara lain di Denmark, Inggris, Belanda, dan tentu saja di Perancis sendiri. Namun setelah lulus dan kembali ke Indonesia, beberapa undangan pun masih datang, misalnya menjadi pembicara tentang pembangunan perkotaan di Future of Cities Forum 2013 di Hamburg, dan juga menjadi pembicara terkait Climate Change di Paris tahun 2015, namun untuk yang terakhir ini dia terpaksa batal hadir karena acara bersamaan dengan kegiatan di PUPR.

Pria peraih gelar Msc di bidang *Urban Infrastructure Management* dari IHE Delft, Belanda, ini ternyata memiliki

beragam kegemaran. "Saya ini banyak hobinya, mulai dari membaca, traveling, olahraga dan lainnya.". Eko mengakui, traveling yang paling menyenangkan adalah yang dilakukan bersama keluarga. "Sehingga saya merasa pada masa studi S2 dan S3 yang memakan waktu 6 tahun di Perancis itu, merupakan saat yang sangat indah dalam hidup saya dan keluarga," ungkap peraih *Prix Mahar Schutzenberger*, penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa doktoral di Perancis yang penelitiannya dinilai memiliki kontribusi besar bagi sains dan teknologi.



la mengakui, setiap hari libur kuliah kerap dimanfaatkan dengan jalan-jalan bersama keluarga. "eksplorasi alam dan kultur adalah hal yang menarik dimana saya dapat mengajarkan pada keluarga bahwa perbedaan kultur adalah sebuah anugerah," paparnya.

Kondisi penataan infrastruktur perkotaan di Perancis, lanjutnya, cukup memberikan inspirasi. Semoga pengembangan kota di Indonesia ke depan bisa menyamai kota-kota di negara maju baik dari segi livability, sustainability, maupun efficiency (smart).**(ris/infoBPIW)**



Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:
bpiw.pu.go.id



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR

